



PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

Bersama Menghadapi Tantangan

Laporan Tahunan
Program
Kemitraan & Bina
Lingkungan
(PKBL) 2020



BERSAMA MENGHADAPI TANTANGAN

Pandemi COVID-19 yang dapat menular antar manusia serta belum ada obat penangkalnya melanda terkonfirmasi Indonesia sejak awal Maret 2020. Untuk mencegah penyebarannya, Pemerintah Indonesia kemudian memilih memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sebagai alternatif pencegahan, dibandingkan kebijakan *lock-down* yang diberlakukan di berbagai negara.

Kedua pilihan kebijakan tersebut sama-sama memberi dampak lain yang tidak dapat dihindari, yakni tertekannya perekonomian global maupun nasional sehingga akhirnya memasuki masa resesi, yang kemudian membuat tingkat pengangguran maupun tingkat kemiskinan bertambah. Seluruh rangkaian tersebut pada akhirnya membuat tahun 2020 menjelma menjadi tahun krisis multi dimensi, sebagai suatu tantangan yang harus diatasi bersama-sama.

PGN sebagai salah satu BUMN bidang energi terkemuka dengan kegiatan operasional meliputi berbagai wilayah Indonesia selama ini aktif turut mendukung upaya Pemerintah Indonesia memeratakan hasil pembangunan dengan melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kemasyarakatan melalui kerangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang terencana, terukur dan selaras dengan upaya pencapaian tujuan keberlanjutan SDGs.

Mempertimbangkan beratnya krisis multi dimensi yang harus diatasi, PGN kemudian menambahkan kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 sebagai salah satu fokus kegiatan Program Bina Lingkungan, agar bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat, warga korporasi nasional maupun BUMN lainnya dapat bahu-membahu bersama Pemerintah Indonesia, mengatasi penyebaran dan mengendalikan dampak pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. PGN meyakini dengan semangat kebersamaan kita, akan dapat mengatasi tantangan pandemi, dan kembali melanjutkan pembangunan bangsa.





DAFTAR ISI



BAB I

3	IKHTISAR KINERJA PKBL
4	Program Kemitraan
5	Program Bina Lingkungan
6	Penghargaan
7	Peristiwa Penting
10	PENGANTAR DIREKTUR UTAMA



BAB II

14	PENDAHULUAN
16	Kondisi Umum
19	Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
10	Kebijakan Umum PKBL
20	Program Kemitraan
20	Program Bina Lingkungan
27	Arah Ke Depan
27	Struktur Organisasi
28	Visi dan Misi
28	Motto
28	Komitmen Pokok



BAB III

30	PKBL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
34	Komitmen Pemerintah Terhadap Pencapaian Tujuan Keberlanjutan



BAB IV

36	PELAKSANAAN PROGRAM PKBL
38	Rencana dan Realisasi PKBL
40	Kisah sukses Mitra Binaan



BAB V

52	KERJASAMA PENYALURAN PKBL DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BINA LINGKUNTAN
54	Kerjasama Penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan Sesama BUMN
55	Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Lingkungan – Desa Binaan



BAB VI

66	TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS
68	Nama Auditor/KAP, Temuan Auditor, Jenis Pemeriksaan, dan Opini selama 2 (dua) Tahun Terakhir
68	Tindak Lanjut Atas Temuan Auditor dan Temuan Auditor yang Belum Dilaksanakan Selama 2 (Dua) Tahun Terakhir
68	Tindak Lanjut Arahan RUPS, Kementerian BUMN, dan Dewan Komisaris/ Pengawas atas PKBL
69	Penutup
69	Kesimpulan
72	LAMPIRAN – LAMPIRAN
88	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



BAB I

IKHTISAR KINERJA PKBL

“Melalui pelaksanaan program PKBL, BUMN turut berkontribusi secara nyata dalam mendukung upaya pencapaian pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dan turut mendukung menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang harus diatasi dengan segera”



Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan kegiatan pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di sekitar daerah operasi Perusahaan. Oleh sebab itu, PKBL dipandang sebagai wujud nyata kontribusi BUMN terhadap upaya yang dilaksanakan bersama seluruh warga dunia lain dalam memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Kebijakan dan pelaksanaan PKBL dalam tahun 2020 pada prinsipnya tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yang telah melakukan beberapa penyesuaian sebagai landasan baru dalam pelaksanaan PKBL. Penyesuaian kebijakan PKBL yang

dilakukan sejak tahun 2017 itu ditetapkan pada RUPS tahun 2017 dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/7/2017 tentang perubahan kedua PerMen BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 mengenai Program PKBL.

Atas dasar itu, sejak tahun 2019, pelaksanaan Program PKBL lebih difokuskan pada pelaksanaan program Bina Lingkungan, sedangkan Program Kemitraan (PK) dihentikan termasuk tidak ada lagi penyaluran dana baik dari operasional maupun dari laba tahun sebelumnya, begitu pula PGN tidak lagi melakukan kegiatan penyaluran dana PK kepada calon mitra binaan langsung, namun tetap melaksanakan kegiatan penagihan saldo piutang kepada para Mitra Binaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.



PROGRAM KEMITRAAN

Sebagaimana disebutkan diatas, pelaksanaan Program Kemitraan sejak tahun 2019 dipusatkan pada upaya monitoring dan mengintensifkan usaha pemulihan kualitas pinjaman pada mitra binaan yang memiliki status diragukan dan macet, baik mereka yang tergabung dalam kluster maupun individu. Dalam rangka mendukung Program mengefektifkan pengelolaan Portofolio Dana Kemitraan dari Kementerian BUMN agar lebih sesuai dengan tujuan program, PGN telah mengalihkan sebagian besar portofolio kelolaan, terutama yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama salur BUMN, kepada BUMN Khusus.

Namun demikian, dalam tahun 2020 Kami terus melanjutkan program pembinaan kepada mitra binaan yang masih berada dalam portofolio kelolaan dan berasal dari mekanisme penyaluran langsung, antara lain dengan mengikutsertakan mereka dalam pameran dan memberikan motivasi serta *sharing session* pengalaman dari mitra binaan yang telah berhasil mengembangkan usahanya.

EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

Dengan tidak adanya penyisihan dan penyaluran dana Program Kemitraan sejak tahun 2016, maka kami tidak lagi melakukan pengukuran indeks Efektifitas Penyaluran Dana Program Kemitraan.

KOLEKTIBILITAS PENGEMBALIAN POKOK PINJAMAN

Sejalan dengan tidak adanya penyaluran pinjaman, tingkat kolektibilitas pengembalian pun menurun menjadi 0% pada tahun 2020 (2019: 12,36%) yang dihitung dari pengembalian pinjaman mitra binaan lama.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Realisasi penyaluran dana Program Bina Lingkungan untuk tahun 2020 total berjumlah Rp55.380.749.072. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020, selain merealisasikan program-program rutin, Kami juga berfokus pada pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka turut serta berkontribusi pada upaya pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 di seluruh wilayah operasionalnya. Mulai terkonfirmasi masuk Indonesia sejak Maret 2020, pandemi COVID-19 kemudian dinyatakan sebagai Bencana Nasional oleh Presiden RI, sehingga sebagai salah satu BUMN terkemuka di bidang energi, PGN terpanggil untuk turut mendukung program-program pencegahan dan penanggulangan pandemi.

Untuk meningkatkan efektivitas Program Bina Lingkungan, sebelum sebuah kegiatan diluncurkan, terlebih dahulu dilakukan ekspose proposal oleh calon Mitra Kerja termasuk melakukan pemetaan masyarakat (*social mapping*) di sekitar aset strategis perusahaan. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil *social mapping* tersebut, dengan harapan manfaat bantuan lebih optimal dan lebih tepat sasaran.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan salah satu program unggulan Bina Lingkungan, yakni Program Desa Binaan, Kami merealisasikan program evaluasi penilaian pelaksanaan program Desa Binaan. Terdapat 5 aspek yang kami nilai, yakni: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indikator Kemandirian Program (IKP), Keterlibatan *Stakeholder*, Keterkaitan SDGs dengan Desa Binaan, termasuk Dampak program terhadap kualitas kehidupan masyarakat Desa Binaan.

Hasilnya secara keseluruhan pelaksanaan program Desa Binaan telah berlangsung dengan baik, dan memberi nilai rata-rata kinerja 4,61 dari skala maksimal 5, serta terbukti memberi berbagai manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan di Desa Binaan yang selaras dengan upaya pencapaian tujuan keberlanjutan.



Rp **55.380.749.072**

Realisasi penyaluran dana Program
Bina Lingkungan untuk tahun 2020



Nilai Rata-Rata Kinerja

4,61 dari skala maksimal 5



PENGHARGAAN



Top CSR Awards 2020 - Star 4



TOP Leader on CSR Commitment
2020



Platinum Rank (Tingkat Asia)
Asia Sustainability Reporting
Rating 2020

PERISTIWA PENTING



Januari - Februari 2020

Bantuan Korban Bencana Banjir Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang

Dalam rangka membantu para korban bencana alam banjir di wilayah Jabodetabek, PGN menyalurkan bantuan bencana, berupa kebutuhan pokok, pakaian dan berbagai kebutuhan lainnya.

Maret 2020

Bantuan Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19

Awal Maret 2020, Pandemi COVID-19 mulai melanda.

PGN dengan sigap merealisasikan program Bantuan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Penyebarannya yang berlangsung antar manusia dan fakta penyakit ini belum ada obatnya, membuat Presiden RI kemudian menyatakan Pandemi COVID-19 sebagai Bencana Nasional.



April 2020

Penyerahan Bantuan APD 20 RS Rujukan Penanganan Pandemi COVID-19

Rumah Sakit serta tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Untuk mendukung tugas mereka, Kami menyalurkan bantuan 20 paket APD kepada 7 rumah sakit rujukan di wilayah operasional PGN.



Mei - Juni 2020

Bantuan Posko Masak Satgas Lawan COVID-19

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Satgas COVID-19, PGN memberi bantuan posko masak untuk mensuplai kebutuhan makanan Satgas COVID-19 yang bekerja non-stop 24 jam setiap hari.

September 2020

Realisasi program-program Bina Desa

Desa Binaan merupakan salah satu program unggulan dari realisasi Bina Lingkungan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan Desa Binaan, cukup beragam, sesuai kondisi dan potensi Desa Binaan. Diantara kegiatan tersebut adalah pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala, pengembangan koperasi dan pengembangan wisata bahari Desa Binaan. Presiden RI kemudian menyatakan Pandemi COVID-19 sebagai Bencana Nasional.



Pengobatan dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Kel Tembesi

Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan



Penanaman Mangrove dalam rangka pengembangan Pulau Wisata Bahari - Lance



Desember 2020

Penyerahan Bantuan Ambulans

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas layanan kesehatan di berbagai daerah, PGN menyerahkan bantuan 1 unit mobil *ambulance* untuk Yayasan Pendidikan Nurul Islam, Magetan.



PENGANTAR DIREKTUR UTAMA



Pemegang Saham Yang Terhormat,

Kembali kami menyampaikan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 2020. Laporan ini memuat kinerja PGN dalam melaksanakan program PKBL untuk periode tahun 2020. Melalui Laporan PKBL ini, Pemegang Saham dapat menilai, berapa jauh PGN telah melaksanakan kewajiban yang terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) selama tahun 2020.

Sebagaimana yang digariskan oleh pemerintah, pelaksanaan PKBL terdiri dari dua bagian pokok, pertama Program Kemitraan, dan kedua, Program Bina Lingkungan. Sesuai dengan kebijakan perusahaan dan arahan Pemegang Saham, sama seperti tahun sebelumnya, di tahun 2020 kami kembali tidak membentuk dana Program Kemitraan dan menyalurkannya kepada mitra binaan secara langsung. Namun demikian, di tahun 2019, kami menjalankan keputusan RUPS tahun 2018 lalu, yang mengamanatkan realisasi pengalihan pengelolaan portofolio Dana Kemitraan kepada BUMN Khusus sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (PerMen BUMN) Republik Indonesia No.S.822/MBU/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus.

Kami merealisasikan pengalihan portofolio Dana Kemitraan dimaksud, khususnya portofolio Dana Kemitraan yang berasal dari kerjasama Salur BUMN, total senilai Rp177.974.635.344,- kepada BUMN Khusus pada tanggal 9 Mei 2019, sehingga saldo portofolio kelolaan dana Program Kemitraan per akhir tahun 2019 tinggal berjumlah Rp9.322.26.000,-. Kami kemudian berkonsentrasi untuk mengelola sisa portofolio dimaksud, tetap berupaya melakukan penagihan dan tetap melaksanakan program pembinaan UKM yang menjadi Mitra Binaan dari realisasi program penyaluran langsung.

Pada tahun 2020, upaya-upaya penagihan dan pengelolaan sisa portofolio membuat portofolio dana kelolaan Program Kemitraan meningkat menjadi total sebesar Rp12.000.486.179,-.

Untuk Program Bina Lingkungan, pada tahun 2020 total dana yang tersedia adalah sebanyak Rp28.812.866.081,- yang mayoritas berasal dari biaya operasi perusahaan. Jumlah ini menurun -49,50% dari tahun sebelumnya, sebesar Rp57.062.367.317,-. Disamping itu, pada tahun 2020 kami juga menyiapkan dana TJSL yang berasal dari operasi perusahaan sebesar Rp26.567.882.991,-.

Program TJSL ini dilakukan sesuai dengan amanat UU Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 Pasal 74.

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara, kami memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Oleh karenanya sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang kemudian dinyatakan sebagai Bencana Nasional, Kami memfokuskan sebagian pelaksanaan program Bina Lingkungan, juga mengalokasikan dananya untuk mendukung program-program pencegahan dan pengendalian dampak pandemi tersebut. Sebagai wujud dukungan, Kami merealisasikan program-program khusus, meliputi: Pembagian peralatan maupun masker untuk menegakkan aturan protokol kesehatan, Pembagian Bantuan Sosial bagi masyarakat terdampak Covid, Dukungan pasokan gas

Kami juga tetap merealisasikan program-program Bina Lingkungan rutin lainnya, yakni program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat marginal terutama di sekitar daerah operasi PGN.





SUKO HARTONO
DIREKTUR UTAMA



BENI SYARIF HIDAYAT
DIREKTUR SDM & UMUM



REDY FERRYANTO
DIREKTUR INFRASTRUKTUR
DAN TEKNOLOGI



FARIS AZIZ
DIREKTUR KOMERSIAL



ARIE NOBELTA KABAN
DIREKTUR KEUANGAN

bagi Dapur Umum di Wisma Atlet, Bantuan APD bagi 7 rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID-19, dan sebagainya.

Kami juga tetap merealisasikan program-program Bina Lingkungan rutin lainnya, yakni program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat marginal terutama di sekitar daerah

operasi PGN. Ragam kegiatan yang kami jalankan dengan dukungan dan Program Bina Lingkungan maupun TJSL meliputi kegiatan pada bidang: pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, sarana dan prasarana umum, bantuan bencana alam, pelestarian alam dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Dengan berbagai jenis kegiatan spesifik yang dijalankan tersebut PKBL dan TJSL semakin menunjukkan relevansinya dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TBP).

Agar memberi manfaat yang optimal, kami terus berupaya menyempurnakan kualitas pengelolaan PKBL dan TJSL secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kondisi dan lingkungan bisnis maupun lingkungan sosial masyarakat sekitar. Kami melanjutkan program *social mapping* sebelum merealisasikan berbagai kegiatan spesifik dalam rangka meningkatkan manfaat program.

Kami juga secara konsisten berupaya meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan pihak terkait termasuk dengan

Pemerintah Daerah, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai program, dengan tujuan yang sama, yakni optimalisasi manfaat pelaksanaan program.

Kami bahkan merealisasikan program penilaian respons masyarakat penerima manfaat program Bina Lingkungan Unggulan, yakni Program Desa

Binaan, termasuk menilai manfaat pelaksanaan program terhadap kehidupan masyarakat, selain menilai keselarasan program dengan upaya pencapaian tujuan keberlanjutan, SDGs. Dari hasil evaluasi penilaian tersebut, Kami telah merencanakan perbaikan pelaksanaan program Desa Binaan di 6 Desa yang selama ini dijalankan.

Sebagai penutup, atas nama Direksi, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras dalam mendukung upaya peningkatan kinerja PKBL termasuk TJSL di tahun 2020.

Jakarta, April 2021

Suko Hartono
Direktur Utama



BAB II

Berikut Kami sampaikan Laporan kinerja pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2020 kepada Pemegang Saham. Melalui laporan ini Pemegang Saham dapat menilai sampai sejauh mana PGN telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh UU 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

”

Kami merealisasikan berbagai kegiatan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya PGN untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi pandemi COVID-19 dan bersama-sama melanjutkan pembangunan negeri .



Laporan Tahunan PKBL PGN tahun 2020 ini mencakup pelaksanaan kegiatan PKBL untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2020. Melalui laporan PKBL ini kami menyampaikan pelaksanaan dan laporan keuangan PKBL selama periode 2020, sebagai wujud pertanggungjawaban Perusahaan kepada pemegang saham. Kami menyusun Laporan PKBL PGN ini berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.

KONDISI UMUM

Komitmen PGN untuk senantiasa berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik terus dijalankan baik melalui penyediaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan maupun melalui pelaksanaan PKBL. Realisasi komitmen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanah konstitusi, yaitu berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UU no.19/2003 pasal 2 ayat 1 huruf e.

Bagi PGN, pelaksanaan beragam kegiatan dalam program PKBL menunjukkan tekad Perseroan dalam mendukung upaya Pemerintah mewujudkan beragam rumusan tujuan pembangunan berkelanjutan, *Sustainable Development Goals - SDGs*. SDGs telah diputuskan bersama melalui serangkaian sidang di PBB yang dikoordinir oleh *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* sebagai rujukan dalam melaksanakan program pembangunan berkelanjutan. SDGs terdiri dari 17 rumusan tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi prakarsa SDGs dimaksud dan telah menyusun serta merealisasikan berbagai rencana strategis tingkat nasional untuk mewujudkan prakarsa tersebut.

Sebagai salah satu BUMN, PGN juga memiliki peran signifikan untuk turut serta mendukung pencapaian beragam rumusan tujuan dalam SDGs tersebut.

Berbagai langkah strategis telah disusun dan dijalankan oleh PGN untuk berkontribusi mendukung pencapaian beragam rumusan tujuan dalam SDGs, antara lain melalui pelaksanaan PKBL.

LANDASAN HUKUM

Realisasi beragam kegiatan dalam Program PKBL merupakan kebijakan strategis perusahaan yang pelaksanaannya mengacu pada berbagai peraturan, diantaranya:

- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 06 Agustus 2007 Perihal Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang: Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2012 Tanggal 4 April 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang: Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 20/MBU/2012 Tanggal 27 Desember 2013.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang: Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2012 tanggal 1 Mei 2013.

- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang: Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, serta Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-02/MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahannya Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN.
- Nota Dinas Nomor 024400.ND/HM.05/FIN/2016 tanggal 9 Juni 2016 Perihal Kebijakan terkait pelaksanaan PKBL.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-02/ MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (PerMen BUMN) Republik Indonesia No.S.822/MBU/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

REALISASI PROGRAM

Sebagai program mandatori strategis yang juga memiliki pengaruh penting bagi eksistensi perusahaan di tengah masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, pengelolaan PKBL dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri yaitu Divisi Corporate Social Responsibility (CSR) yang berada dibawah kendali Direktur SDM dan Umum.

Divisi CSR PGN bertanggungjawab mengelola PKBL dengan pengertian bahwa Divisi CSR ini juga bertanggungjawab melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dana CSR berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu;

1. Biaya perusahaan untuk PKBL
2. Biaya perusahaan untuk TJSL

Sejak Tahun 2019 dalam rangka mendukung upaya inisiatif Kementerian BUMN untuk mengoptimalkan dana PKBL yang berasal dari penyisihan laba perusahaan yang selama ini tertahan di BUMN Pembina, seperti terjadi di PGN, Perseroan menjalankan mekanisme penyaluran dana PKBL, khususnya dana Program Kemitraan sebagaimana diatur dalam PerMen BUMN RI No.S.822/MBU/12/2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus beserta SK Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN no. SK-03/D7.MBU/12/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Penyaluran Dana Program Kemitraan BUMN Melalui BUMN Khusus.

Sesuai dengan peraturan tersebut Perseroan kemudian menyalurkan saldo dana Program Kemitraan dimaksud dari portofolio program PKBL sebesar Rp177.974.635.344 kepada PT PMN sebagai BUMN Khusus.



Sebagai dampak penyaluran tersebut, saldo dana PKBL dari alokasi laba untuk Program Kemitraan diakhir tahun 2019 tinggal menjadi sebesar Rp9.322.251.000. Tidak ada lagi penyaluran dana Program Kemitraan kepada para Mitra Binaan yang dilakukan PGN. Untuk Program Kemitraan, PGN hanya berkonsentrasi pada upaya penagihan terhadap outstanding dana pinjaman para Mitra Binaan yang pernah mereka terima, baik secara langsung maupun melalui kerjasama. Sehubungan dengan adanya penerimaan pendapatan jasa administrasi dari penempatan dana tersebut di perbankan nasional, juga adanya pendapatan lain, maka saldo dana PKBL tersebut di akhir tahun 2020 kemudian berkembang menjadi senilai Rp12.000.486.179.

Sementara itu, untuk tahun 2020, jumlah total penyaluran dana CSR yang direalisasikan adalah sebesar Rp55.380.749.072. Total dana tersebut berasal dari penyaluran dana Program Bina Lingkungan dari alokasi laba, sebesar Rp54.000.000, kemudian pelaksanaan penyaluran Program Bina Lingkungan yang berasal dari biaya perusahaan sebesar Rp28.758.866.081 serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar Rp26.567.882.991.

Dengan realisasi penyaluran tersebut, maka jumlah saldo dana PKBL yang tersedia per 31 Desember 2020, baik yang berasal dari alokasi laba maupun dari biaya perusahaan, setelah dikurangi beban yang masih harus dibayarkan senilai Rp0 adalah sebesar Rp12.000.486.172.

PENYESUAIAN FOKUS PADA PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Sejak 2017 telah dilakukan penyesuaian kebijakan PKBL yaitu lebih difokuskan pada pelaksanaan program Bina Lingkungan dan menghentikan penyaluran dana Program Kemitraan (PK) termasuk tidak ada lagi penyisihan dana untuk PK.

Penyaluran dana PK yang dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai respons Perusahaan terhadap Peraturan Menteri BUMN mengenai BUMN Khusus sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Program Bina Lingkungan 2020 sebagian besar dibiayai melalui saldo dana dari biaya perusahaan, ditambah dari alokasi laba. Program Bina Lingkungan (BL) yang dilaksanakan selama 2020 meliputi Program BL di berbagai sektor, yaitu; pendidikan, kesehatan, sektor sarana & prasarana umum, serta bantuan sarana ibadah, pelestarian alam dan program pengentasan kemiskinan.

Kami terus menjalin sinergi dengan BUMN lain serta pihak-pihak lainnya yang berkompeten dalam menjalankan program tersebut, sehingga efektifitas program dapat ditingkatkan dan dan sasaran program dapat dioptimalkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian terkait lainnya.

MENGURAI MASALAH PIUTANG MACET

Kami tetap konsisten berupaya menyelesaikan kendala piutang bermasalah dari para mitra binaan, baik yang disalurkan langsung maupun disalurkan melalui program BUMN Sinergi. Kami melakukan penelusuran akun-akun mitra binaan langsung

melalui kerjasama erat dengan pihak bank penyalur. Kami juga menjalin kerja sama erat dengan mitra pelaksana BUMN Sinergi dalam melakukan penelusuran dan merekonsiliasi akun para mitra binaan dengan bank penyalur.

Konsistensi upaya bersama dengan bank maupun mitra BUMN sinergi tersebut, termasuk dalam menjalankan upaya penagihan secara intensif, memberi hasil dengan kembali menurunnya outstanding pinjaman bermasalah. Jumlah piutang macet per 31 Desember 2020 kembali mengalami penurunan menjadi senilai Rp158.988.340.151,00 dari sebesar Rp160.510.098.148 di tahun 2019.

UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dari 17 rumusan tujuan dalam konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), melalui PKBL kami mendukung penuh upaya pencapaian 7 butir rumusan tujuan tersebut, yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan

Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun.

2. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di segala usia.

3. Pendidikan Berkualitas

Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.

4. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, produktif serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua.

5. Mengurangi Kesenjangan

Mengurangi kesenjangan di dalam sebuah negara maupun diantara negara-negara di dunia.

6. Keberlanjutan Kota dan Komunitas

Membangun kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan dan berkelanjutan.

7. Aksi Terhadap Iklim

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.



KEBIJAKAN UMUM PKBL

Kami memiliki Kebijakan Penyaluran bantuan CSR secara umum, kegiatan atau bantuan program yang dilaksanakan, harus selaras dengan pencapaian tujuan PGN, yakni:

1. Mendukung kepentingan bisnis eksisting Perusahaan
2. Mendukung kegiatan pengembangan bisnis Perusahaan
3. Menjaga keamanan aset Perusahaan
4. Memberikan manfaat kepada *stakeholders*
5. Mendukung program Pemerintah

Sementara itu, dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan Program Kemitraan, dan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan pengelolaan dana Program Kemitraan, Kami merealisasikan satu langkah strategis, yakni merealisasikan kerjasama penyaluran dengan BUMN Khusus.

Langkah strategis terkait Program Kemitraan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN nomor Per-02/MBU/7/2017, PerMen BUMN RI No.S.822/MBU/12/2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus dan SK Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN no. SK-03/D7.MBU/12/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Penyaluran Dana Program Kemitraan BUMN Melalui BUMN Khusus.

Kami telah mengalihkan sebagian besar pengelolaan dana Program Kemitraan kepada BUMN khusus tersebut sebagai wujud realisasi langkah strategis yang telah ditetapkan. PGN meyakini pengalihan pengelolaan tersebut akan membuat dana Program Kemitraan akan bergulir lebih cepat, sehingga akan memberi *benefit* yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama para mitra UMK binaan, maupun pihak terkait lainnya.

PROGRAM KEMITRAAN

Sesuai dengan kebijakan perusahaan sebagaimana telah disebutkan diatas, sejak tahun 2017, PGN berfokus pada pelaksanaan program Bina Lingkungan, sedangkan untuk Program Kemitraan Kami telah merealisasikan pengalihan sebagian besar portofolio kepada BUMN khusus, namun masih tetap mengupayakan pengelolaan sisa piutang secara optimal.

PENGELOLAAN PIUTANG MITRA BINAAN

Kami mengupayakan pengelolaan sisa piutang secara intensif dengan cara:

- Memberikan kode *virtual account* kepada mitra binaan.
- Memonitor pembayaran angsuran melalui *fasilitas cash management system* (CMS) dari bank yang bisa dilihat secara *online*.
- Melakukan konfirmasi melalui telepon.
- Melakukan kunjungan langsung ke mitra binaan.
- Melakukan konfirmasi dan penagihan piutang secara periodik.
- Melakukan penjadwalan ulang cicilan *outstanding* pinjaman.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Program Bina Lingkungan Kami jalankan sebagai program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus sebagai wujud kontribusi nyata PGN bagi upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam SDGs. Prioritas Penerima Program Bina Lingkungan adalah untuk masyarakat di sekitar wilayah operasional yang signifikan, selain masyarakat di wilayah lainnya sesuai kebijakan pemerintah.

PENYALURAN DANA

Rp 55.380.749.072



Jumlah
Penyaluran
Dana CSR
2020

Jumlah penyaluran tersebut berasal dari:

Sumber dana Program	Jumlah (Rp)
Program Bina Lingkungan yang berasal dari alokasi laba perusahaan	54.000.000
Program Bina Lingkungan yang berasal dari biaya perusahaan	28.758.860.081
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari biaya perusahaan	26.567.882.991
Total	55.380.749.072

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Realisasi Program Bina Lingkungan dilaksanakan melalui beragam kegiatan dalam 7 (tujuh) pilar kegiatan utama, yaitu:



Bantuan Korban Bencana Alam



Bantuan Sarana Ibadah



Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan



Bantuan Pelestarian Alam, dan



Bantuan Sarana Kesehatan



Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan.



Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum



BANTUAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM

Sebagai salah satu negara kepulauan yang berada di wilayah cincin api, bencana yang umumnya terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, erupsi gunung berapi, puting beliung, gelombang pasang, banjir, tanah longsor – saat musim penghujan, serta kebakaran hutan & lahan dan kekeringan, saat kemarau melanda. Namun pada tahun 2020, pandemi COVID-19, yang awalnya terdeteksi di Wuhan, China di akhir tahun 2019, kemudian melanda seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan wabah corona virus atau COVID-19 sebagai Bencana Nasional sehingga pada tahun 2020 Indonesia dalam posisi tanggap darurat bencana non alam pandemi COVID-19.

Berdasarkan perkembangan kondisi terakhir tersebut, dimana pandemi COVID-19 mempengaruhi seluruh sendi kehidupan sosial kemasyarakatan, PGN kemudian menerapkan kebijakan untuk turut memberikan bantuan kepada korban bencana non alam termasuk bantuan pencegahan dan penanggulangan korban wabah COVID-19.

Adapun realisasi bantuan bencana alam dan non alam yang Kami berikan pada tahun 2020, antara lain:

- **Bantuan Korban Banjir di Jabodetabek dan Sumatera Utara**

Bulan Januari 2020, terjadi bencana banjir yang melanda DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sejumlah di daerah lain Pulau Jawa sejak 1 Januari 2020 setelah Tahun Baru, akibat terjadinya hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Jakarta dan sekitarnya sejak 31 Desember 2019 sore. Pada akhir tahun 2020 hujan berintensitas tinggi juga menyebabkan banjir di kota Medan, Sumatera Utara.

Untuk meringankan beban mereka yang menjadi korban banjir di kedua wilayah tersebut, PGN kemudian berkontribusi memberikan bantuan tempat tinggal sementara dan bantuan sembako kepada pekerja PGN serta masyarakat di sekitar wilayah operasional yang terdampak banjir.

- **Bantuan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19**

Penyebaran virus COVID-19 yang dapat terjadi antar manusia dengan cepat, dan belum tersedianya obat untuk mengatasinya, membuat berbagai negara menerapkan kebijakan “lock-down”, atau penutupan area terdampak secara ketat, maupun semi ketat. Pemerintah Indonesia memutuskan memberlakukan kebijakan “Pembatasan Sosial Berskala Besar” (PSBB), dengan mengharuskan seluruh warga menerapkan jaga jarak dan membatasi kegiatan sosial, termasuk kegiatan ekonomi.

Kondisi tersebut membuat perekonomian seluruh negara, termasuk Indonesia tertekan, dan terkonfirmasi memasuki periode resesi. Banyaknya sektor yang terdampak, memaksa pelaku usaha mengurangi pegawai, membuat tingkat pengangguran terbuka kembali meningkat, dan jumlah warga golongan miskin juga meningkat.

Memperhatikan kondisi tersebut, PGN berupaya membantu Pemerintah dalam menanggulangi dampak penyebaran COVID-19 tersebut. Adapun bantuan yang Kami berikan antara lain:



Bantuan paket sembako kepada pekerja PGN dan masyarakat yang membutuhkan



Penyediaan fasilitas sarana cuci tangan portable di beberapa fasilitas umum



Penyediaan APD, masker medis, alat desinfektan, hand sanitizer kepada beberapa Rumah Sakit di Indonesia, pekerja PGN, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan.



Bantuan aktivasi gas untuk dapur umum di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran selama 5 bulan



Paket makanan bergizi bagi Tenaga Kesehatan di beberapa Rumah Sakit di Jakarta



Bantuan penyediaan rapid test massal di Tasikmalaya



Bantuan sembako kepada masyarakat terdampak di wilayah operasional PGN di beberapa Provinsi di Indonesia

BANTUAN PENDIDIKAN

PGN memberi perhatian besar terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di Indonesia, dengan disertai keyakinan bahwa melalui pendidikan, masyarakat miskin dan tertinggal, atau bahkan mereka yang difabel, akan dapat memutus “lingkaran kemiskinan” yang menjerat mereka,

sehingga pada akhirnya dapat berpartisipasi penuh untuk turut bersama-sama membangun bangsa. Oleh karenanya Kami berkomitmen penuh untuk senantiasa mendukung kemajuan pendidikan dengan menyalurkan berbagai bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Bentuk bantuan yang Kami salurkan, antara lain adalah:

- Bantuan Pendidikan Putra Putri TNI dan POLRI
- Bantuan beasiswa Perguruan Tinggi bagi 45 putra putri TNI dan Polri di Riau.
- Bantuan Pendidikan di 3 PTN (UGM, UNILA, AKAMIGAS).
- Bantuan beasiswa pendidikan selama dua semester.
- Bantuan WIFI *Corner* di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Bantuan fasilitas tempat serta layanan internet untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan dan sarana IT di UIN Raden Intan Lampung.
- Bantuan Pendidikan untuk Anak Yatim dalam Rangka Nuzulul Quran.
- Bantuan pendidikan kepada lebih dari seribu anak yatim dibawah Yayasan yang berada di sekitar wilayah operasional Perusahaan.
- Bantuan Penelitian Diplomasi Sektor Energi UGM.
- Bantuan biaya pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau riset diplomasi sektor energi.
- Bantuan Renovasi Sekolah.

BANTUAN PENINGKATAN KESEHATAN

Aspek Kesehatan menjadi salah satu fokus tujuan pembangunan berkelanjutan dalam rumusan SDGs, yakni rumusan tujuan ke-3 “memastikan kehidupan yang sehat dan mengutamakan kesehatan di segala usia”. Dasar fokus kontribusi bantuan peningkatan kesehatan adalah rekaman data PBB tahun 2013 – 2018 yang menunjukkan bahwa paling tidak sekitar 40% Negara di dunia belum mampu menyediakan 10 tenaga dokter per 10.000 penduduk dan lebih dari 55% Negara di dunia memiliki kurang dari 40 suster dan tenaga bidan per 10.000 penduduk.

Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh belahan dunia, membuat kehadiran tenaga kesehatan semakin dibutuhkan. Oleh karenanya Kami menjadikan bantuan sarana dan prasarana kesehatan sebagai salah satu fokus bantuan, salah satunya melalui penyediaan layanan konsultasi kesehatan.

Penyediaan layanan konsultasi kesehatan tersebut menjadi wujud nyata kontribusi PGN dalam menjawab tantangan kurangnya tenaga medis di Indonesia yang kini juga menjadi salah satu negara terdampak pandemi COVID-19. Adapun bantuan kesehatan yang Kami sediakan, antara lain berupa:

- **Pelayanan kesehatan melalui Mobil Sehat di wilayah operasional PGN**
Sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, PGN ikut berpartisipasi dengan mengadakan pelayanan kesehatan melalui mobil sehat terutama di wilayah operasional PGN. Pelayanan kesehatan ini meliputi penyuluhan kesehatan, pengobatan gratis dan pemeriksaan kesehatan bagi warga kurang mampu.
- **Bantuan pusat kesehatan desa di Desa Binaan PGN**
Pemberian bantuan pusat kesehatan desa ini Kami laksanakan guna mendukung program Pemerintah, yakni program pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Targetnya adalah agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
- **Khitanan Massal**
Bantuan khitanan massal bagi 150 anak di Area Pelanggan Gas PGN Jakarta.
- **Pengadaan Mobil Ambulance**
Mobil ambulance merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh lembaga, badan hukum, ataupun Yayasan dimana *ambulance* dapat meningkatkan dan menunjang kegiatan dalam penanganan kondisi darurat. Oleh karena itu, PGN turut serta menyalurkan bantuannya untuk pengadaan mobil *ambulance* di beberapa wilayah.

BANTUAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN/ATAU SARANA UMUM

Ketersediaan prasarana dan sarana umum merupakan salah satu prasyarat terciptanya kegiatan perekonomian yang kondusif dan berkesinambungan, serta bagi terpenuhinya kualitas hidup minimal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional menunjukkan, 33,4 juta penduduk di Indonesia mengalami kekurangan air bersih dan 99,7 juta jiwa kekurangan akses untuk ke fasilitas sanitasi yang baik.

Data tersebut berarti menunjukkan persentase pemenuhan akses air bersih di Indonesia baru berada di kisaran 72,6% total jumlah penduduk. Sementara target SDG's menetapkan aksesibilitas sebesar 100%.

Oleh karenanya, bantuan akses sarana air bersih menjadi salah satu fokus penyaluran dana bantuan TJSL PGN selain beberapa sarana lainnya seperti:

- **Bantuan Pembuatan Sumur Artesis**
Pengadaan sumur dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air warga yang mendesak untuk dipenuhi.
- **Bantuan Perbaikan Jalan Muara Enim**
Pembangunan atau perbaikan jalan dilakukan dalam rangka keamanan dan keselamatan pada Jalur Pipa Gas Transmisi.

BANTUAN SARANA IBADAH

Keberadaan sarana ibadah yang memadai dan kelancaran kegiatan keagamaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang mental spiritual dan kesehatan jiwa. Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO) mendefinisikan kesehatan jiwa sebagai “ketika seseorang tersebut merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup serta dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain”.

Untuk mendukung tercapainya kondisi tersebut, Kami menggelar sejumlah kegiatan perbaikan sarana ibadah dan bantuan-bantuan lainnya terkait kesehatan spiritual. Hal ini diharapkan akan berdampak pada kesehatan mental masyarakat melalui penyaluran bantuan diantaranya:

- **Renovasi Sarana Ibadah**
Sebagai bentuk kepedulian PGN dalam aktivitas keagamaan masyarakat, Kami turut membantu pembangunan atau pembenahan sarana ibadah untuk menunjang kegiatan beribadah masyarakat antara lain adalah renovasi masjid dan gereja di beberapa wilayah.
- **Perayaan Hari Raya Keagamaan**
Bantuan PGN dalam sektor sarana ibadah antara lain juga diwujudkan melalui dukungan bagi perayaan hari besar keagamaan. Contohnya adalah pemberian bantuan hewan qurban di sekitar wilayah operasi PGN, bantuan perayaan Natal untuk beberapa gereja serta perayaan Saraswati di Bali.

BANTUAN PELESTARIAN ALAM

Kelestarian Lingkungan menjadi salah satu fokus utama dalam rumusan SDGs, sehingga terdapat tidak kurang dari 6 rumusan tujuan pembangunan yang menyangkut perbaikan lingkungan, yakni: Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi yang layak), Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 14 (Ekosistem Lautan) dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan).

Pemerintah Indonesia juga menjadikan aspek perbaikan kondisi lingkungan menjadi salah satu target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karenanya, Kami merealisasikan beragam kegiatan di bidang lingkungan sebagai wujud kontribusi PGN dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan tersebut, meliputi:



- **Program Keanekaragaman Hayati di Kalisogo dan Pagardewa**

Merupakan salah satu bentuk kepedulian Perusahaan dengan memiliki sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status dan kecenderungan sumberdaya keanekaragaman hayati yang dikelola di sekitar wilayah operasional Perusahaan.

- **Penanaman Mangrove Daerah Wisata Panaran/ Pulau Lance**

Penanaman mangrove merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi abrasi pada daerah pesisir pantai di Daerah Wisata Panaran/Pulau Lance.

BANTUAN SOSIAL UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan global yang harus diatasi bersama, mengingat dampak kemiskinan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial suatu bangsa maupun suatu kawasan selain berpengaruh nyata bagi kelestarian dan kualitas lingkungan sekitarnya. Mengatasi masalah kemiskinan melibatkan berbagai aspek, mencakup kepastian perlindungan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan akses ke layanan dasar, penyediaan sumber pendapatan dan pemanfaatan sumberdaya tersedia secara optimal.

Dimensi dampak maupun kebutuhan pelaksanaan program yang kompleks menyangkut berbagai aspek yang mencakup tidak hanya ekonomi tetapi juga kesehatan, pendidikan, akses penghidupan, dan lain sebagainya itulah yang membuat upaya pengentasan kemiskinan menjadi program bersama, dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak.

Hal tersebut tercermin dalam kegiatan Pengembangan Desa Binaan. PGN menunjukkan komitmennya dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang berada di sekitar wilayah *Offstake Station* PGN. Dengan terjaganya keharmonisan, maka upaya untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan berdaya saing melalui pelaksanaan program Desa Binaan dapat berjalan dengan hasil yang optimal.

Pelaksanaan program Desa Binaan PGN dilaksanakan pada berbagai wilayah desa, antara lain: Desa Binaan Panaran dan Tambesi di Batam, Desa Binaan Pagardewa di Muara Enim, Desa Binaan Bojonegara, Serang, Desa Binaan Labuan Maringgai di Lampung Timur, Desa Semare, Pasuruan dan Desa Tambak Kalisogo di Sidoarjo.



ARAH KE DEPAN

Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan PKBL melalui realisasi berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat marginal, antara lain dengan menjalankan :

1. Penyempurnaan sistem dan prosedur serta sistem informasi PKBL sehingga pelaksanaan PKBL dapat kami lakukan dengan tepat, cepat, dan akurat.
2. Sinergi dengan BUMN serta pihak-pihak yang berkompeten, sehingga PKBL dapat kami laksanakan secara efektif dan tepat sasaran.
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pelatihan bagi mitra binaan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyaluran bantuan.
5. Peningkatan kompetensi bagi pengelola PKBL melalui pendidikan dan pelatihan.

6. Menggiatkan kegiatan monitoring piutang sehingga meningkatkan kolektibilitas pengembalian pinjaman.
7. Menjaga hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 006100.K/OT.00/UT/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Struktur Organisasi President Director's Office, Strategy and Business Development Directorate and Human Capital and General Services Directorate PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, dan Surat Penugasan Division Head, Human Capital Management, struktur organisasi CSR Division adalah sebagai berikut:





VISI DAN MISI

VISI

Menjadi Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diakui secara nasional.

MISI

- Berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Berkontribusi secara aktif dalam mencerdaskan masyarakat, meningkatkan kesehatan, mengembangkan sarana umum/ ibadah, menjaga pelestarian alam dan membantu korban bencana alam.

MOTTO



KOMITMEN POKOK

- Berkontribusi terhadap peningkatan **KESEJAHTERAAN** masyarakat;
- Menciptakan hubungan **HARMONIS** dengan Stakeholder;
- Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berkelanjutan merupakan **AMANAHA**;
- **RESPONSIF** terhadap masalah sosial masyarakat;
- **EMPATI** terhadap masalah sosial masyarakat





BAB III

PKBL DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

”

Mayoritas negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, kini telah menyepakati dan bersama-sama menyatakan komitmennya dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan bersama untuk memastikan pencapaian rumusan tujuan dalam SDGs.”





Kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan dalam menyelesaikan isu pemanasan global yang ternyata berkaitan erat dengan penyelesaian masalah kemiskinan, masalah sosial kemasyarakatan, ketimpangan pendapatan, kesetaraan hak dalam mengelola sumberdaya alam dan sebagainya membuat seluruh negara-negara di dunia dan masyarakat global kini membuat kesepakatan bersama, untuk bertindak bersama dan menyelesaikan masalah bersama tersebut.

Seperti diketahui bersama konsep tindakan bersama dalam membangun pertumbuhan ekonomi, masyarakat yang bermartabat sekaligus mampu menjaga lingkungan atau kini dikenal sebagai Pembangunan Berkelanjutan tersebut awalnya bernama *Millennium Development Goals* (MDGs). MDGs hanya mengikat beberapa negara maju di benua Amerika, Eropa dan Asia dalam menerapkan berbagai rencana dan konsep pembangunan ekonomi, masyarakat dan lingkungan terpadu dalam kurun waktu 2000-2015.

Evaluasi dari pelaksanaan MDGs kemudian menunjukkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan akan lebih dapat tercapai dengan efisien dan menjanjikan dengan baik, jika seluruh komponen masyarakat global yakni seluruh negara,

pelaku bisnis dan warga biasa, ikut terlibat dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan yang disepakati bersama. Untuk itulah sebelum masa MDGs berakhir, seluruh negara di dunia, melalui serangkaian sidang di PBB yang dikoordinasikan oleh The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) seluruh negara peserta sidang menyepakati konsep pembangunan berkelanjutan yang kemudian dinamakan *Sustainable Development Goals/SDGs* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB), menggantikan konsep *Millennium Development Goals* (MDGs). Konsep pembangunan berkelanjutan SDGs ini disepakati diterapkan pada periode 2015-2030.

Mayoritas negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, kini telah menyepakati dan bersama-sama menyatakan komitmennya dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan bersama untuk memastikan pencapaian rumusan tujuan dalam SDGs.

Rumusan tujuan pembangunan sebagai prakarsa masyarakat global dimaksud meliputi seluruh aspek dasar dalam prinsip keberlanjutan, yakni 3-P, *Planet*, *People* dan *Profit*, yang kemudian dijabarkan kedalam 17 rumusan tujuan, sebagai berikut:


Tanpa Kemiskinan

Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.


Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di segala usia.


Tanpa Kelaparan

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.


Pendidikan Berkualitas

Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.



Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan anak perempuan.



Air Bersih dan Sanitasi

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.



Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang.



Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, produktif serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua.



Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.



Mengurangi Kesenjangan

Mengurangi kesenjangan di dalam sebuah Negara maupun di antara negara-negara di dunia.



Keberlanjutan Kota dan Komunitas

Membangun kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan dan berkelanjutan.



Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.



Aksi Terhadap Iklim

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.



Kehidupan Bawah Laut

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk pengembangan pembangunan yang berkelanjutan.



Kehidupan di Darat

Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggundulan hutan, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.



Institusi Peradilan yang Kuat dan Perdamaian

Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua pihak termasuk untuk lembaga, membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.



Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN KEBERLANJUTAN

Indonesia sebagai anggota PBB, juga telah menyatakan komitmennya untuk menjalankan berbagai inisiatif strategis rencana pembangunan guna mendukung pencapaian target-target pembangunan dalam SDGs. Komitmen kuat Pemerintah Indonesia ini dinyatakan dalam Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang 'Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan'.

Melalui PerPres 59 tersebut seluruh jajaran Pemerintah, Pusat dan Daerah diharapkan dapat mensinergikan dan mengoptimalkan pengelolaan seluruh sumber daya yang dimiliki agar dapat

mendukung tercapainya berbagai rumusan tujuan pembangunan dalam SDGs dengan efisien. PerPres 59 juga menegaskan perlu dirumuskannya Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB / SDGs) – RAN TPB, maupun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB / SDGs) – RAD TPB, dokumen program dan rencana kerja pembangunan 5 (lima) tahunan untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs.

Sebagai bagian dari implementasi program RAN TPB dan RAN TPB tersebut, di tahun 2018, Kementerian Keuangan bahkan telah mendeklarasikan SDG Indonesia One, *platform* rencana kerja di bidang keuangan untuk mendukung pencapaian rumusan tujuan dalam TPB.

Sebagai agen pembangunan, PGN juga berkomitmen penuh mendukung beragam pencapaian tujuan pembangunan dalam SDGs tersebut. Komitmen ini antara lain dilaksanakan melalui pelaksanaan program PKBL. Perencanaan dan realisasi program-program PKBL-PGN dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi fundamental aktual yang sedang dihadapi oleh masyarakat calon penerima manfaat program.

Sebagaimana telah disampaikan pada uraian sebelumnya, mempertimbangkan beratnya dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan sosial

kemasyarakatan, PGN memfokuskan realisasi kegiatan program PKBL pada upaya pencegahan dan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.

Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PGN, senantiasa memiliki keselarasan dengan berbagai rumusan tujuan dalam SDGs (*Global Goals*) tersebut pada setiap kondisi yang dihadapi, baik dari sisi pencapaian tujuan pada aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Program	Relevansinya dengan Tujuan SDGs
Program Kemitraan	• 1 - Tanpa Kemiskinan • 8 - Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak • 10 - Mengurangi Kesenjangan
Program Bina Lingkungan	
• Bantuan Korban Bencana Alam	• 3- Kesehatan dan Kesejahteraan
• Bantuan Pendidikan	• 4- Pendidikan Berkualitas
• Bantuan Peningkatan Kesehatan	• 3- Kesehatan dan Kesejahteraan
• Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum	• 11- Keberlanjutan Kota dan Komunitas
• Bantuan sarana ibadah	• 11- Keberlanjutan Kota dan Komunitas
• Bantuan pelestarian alam	• 13- Aksi Terhadap Iklim
• Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan	• 1 - Tanpa Kemiskinan

Melalui pelaksanaan program PKBL dapat dinilai sampai sejauh mana kontribusi PGN terhadap pencapaian TPB/SDGs. Program PKBL bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat marginal ke arah yang lebih baik dengan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan, memperbaiki pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana umum, memberdayakan perekonomian masyarakat dan ikut serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.



BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM PKBL

”

Realisasi PKBL sejak tahun 2019 dan seterusnya akan semakin berfokus pada pelaksanaan Program Bina Lingkungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat, khususnya dibidang pendidikan. Untuk tahun 2020, selain bidang pendidikan, Kami berfokus pada penyaluran program bantuan kesehatan dan bantuan sosial, dalam rangka menanggulangi dampak pandemi COVID-19 yang melanda.

Sedangkan untuk Program Kemitraan Kami tetap lebih berfokus untuk meningkatkan kinerja mitra binaan yang masih ada dalam pengelolaan, dengan menjalankan program-program pelatihan, pembukaan pasar dan proses penagihan *outstanding* pinjaman“.





“Pasca realisasi pengalihan sebagian besar portofolio Program Kemitraan ke BUMN Khusus, kami akan tetap menjalankan beberapa program pembinaan mitra binaan yang masih ada dalam kelolaan, program pelatihan serta membantu membuka pasar produknya agar mereka mampu mandiri, mengembangkan wirausahanya dan mengembalikan dana pinjamannya.

Sementara itu, kami tetap berfokus merealisasikan beragam kegiatan dalam kerangka Program Bina Lingkungan dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan sosial kemasyarakatan sekaligus mendukung upaya peningkatan kelestarian lingkungan sebagai wujud dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan”.

RENCANA DAN REALISASI PKBL

PROGRAM KEMITRAAN

Tabel Program Kemitraan 2020

Uraian	2020		%
	Rencana (Rp)	Realisasi Rp)	
(1)	(2)	(3)	4= 3/2
Dana Tersedia			
Saldo Awal	9.144.995.798	9.322.251.000	101,94
Penyisihan laba dari BUMN Pembina	-	-	0
Pengembalian Pinjaman dari Mitra Binaan	168.000.000	-	0,00
Pengembalian dana dari BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur	4.666.664.000	579.956.000	12,43
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	163.200.000	1.666.668.784	1021,24
Pendapatan Lain	155.652.000	191.904.000	123,29
Penerimaan Lain	879.607.944	239.706.395	27,25
Dana Tersedia	15.178.119.742	12.000.486.179	79,06
Penyaluran Dana			
Penyaluran Pinjaman Kepada Mitra Binaan	0	0	-
Penyaluran Pinjaman melalui BUMN Khusus	0	0	-
Penyaluran Dana Pembinaan	0	0	-
Sub-Jumlah	0	0	-
Saldo Akhir	15.178.119.742	12.000.486.179	79,06

Dana yang tersedia untuk Program Kemitraan di Tahun 2020 terealisasi sebesar 79,06% dari rencana. Angka tersebut berasal dari realisasi saldo awal, pengembalian pokok, pendapatan jasa serta penerimaan lain dibandingkan rencana. Tidak ada penyaluran dana untuk Program Kemitraan di tahun 2020, mengingat sejak tahun 2019, sudah diputuskan bahwa PGN tidak lagi menyalurkan dana dimaksud secara langsung.

Namun demikian, Kami terus mengupayakan pengalihan pengembalian pokok pinjaman, terutama pembayaran pinjaman sinergi BUMN yang sebagaimana tampak pada tabel, untuk tahun 2020 hanya sanggup mengembalikan dana sebesar Rp579,96 juta atau 12,43% dari rencana yang disepakati.

Di tahun 2020, Kami menerima pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman senilai Rp1.666.67 juta, atau 1.021,24% dari rencana awal. Selain itu, memperoleh realisasi Pendapatan Jasa Giro Kemitraan pada tahun 2020 sebesar Rp191,90 juta atau 123,29% dari rencana.

Sementara itu, PGN juga mencatatkan Penerimaan Lain-lain sebesar Rp239,71 juta atau 27,25% dari rencana.

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran PKBL Tahun 2020, sampai dengan akhir tahun 2020 PGN tidak lagi menyalurkan dana Program Kemitraan untuk para Mitra Binaan secara langsung. Hal ini mengacu pada kebijakan perusahaan melalui Nota Dinas Nomor 024400.ND/HM.05/FIN/2016 tanggal 9 Juni 2016 Perihal Kebijakan terkait pelaksanaan PKB.

Sejak tahun 2019, dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No.S.822/MBU/12/2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus, Kami telah merealisasikan pengalihan pengelolaan sebagian besar portofolio Program Kemitraan, yakni portofolio mitra penyalur BUMN, kepada BUMN Khusus dimaksud. Sisa portofolio Program Kemitraan dari skema penyaluran langsung, tetap dikelola oleh PGN.

Namun demikian, sekalipun penyaluran dananya sementara dihentikan dan sebagian telah dialihkan, program pembinaan mitra binaan dari sisa portofolio Program Kemitraan tetap Kami jalankan. Tujuannya adalah memberi kesempatan pada mitra binaan agar usaha yang mereka jalankan dapat berkembang pada saat kondisi eksternal yang mempengaruhi kemajuan usahanya, kembali membaik.

Pada prinsipnya, Kami tetap mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 pasal 9 ayat (1) point c.1 dan 2 “Beban Pembinaan: Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan”, dan “Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% dari dana Program Kemitraan”, dalam melaksanakan program pembinaan kepada mitra binaan tersebut.

Namun demikian, mengingat terjadinya pandemi sejak awal Maret 2020, dan hingga saat penyusunan Laporan PKBL ini masih berlangsung, untuk tahun 2020 PGN tidak mengganggu maupun merealisasikan program-program pembinaan Mitra Binaan. PGN juga tidak menyertakan para Mitra Binaan dalam penyelenggaraan Pameran maupun promosi produk, mengingat ajang pameran dimaksud, seluruhnya ditiadakan selama tahun 2020.



KISAH SUKSES MITRA BINAAN

KERAMIK TIMBOEL - KASONGAN

Kini area produksi perusahaan PT. Timboel berkembang hingga seluas 10.000 m², dilengkapi galeri penjualan produk seluas 3.500 m² dan didukung oleh puluhan tenaga kerja dari daerah sekitarnya.

Nama : Timbul Raharjo
Alamat : Desa Tirto RT.06 Kasongan Bangunjiwo Kasihan Bantul, Yogyakarta
No. Telpn : 08179566165
Email : timbulksg@yahoo.com
Tahun Pemberian Pinjaman : 2006
Jumlah Pinjaman : 25.000.000,-
Produk : Guci Keramik dan barang-barang seni.
Peningkatan Jumlah : Tahun 2009 telah berubah menjadi perusahaan perseroan terbatas PT. Yakni PT. Timboel.

Sertifikasi Nasional

- Sertifikasi nasional bintang 3 perusahaan binaan Kementerian Perindustrian RI
- Penghargaan eksportir dan
- UPAKARTI Presiden RI

Pameran yang pernah diikuti

- 2008-2009 Ambiente Jerman
- 2013-2019 IFex Jakarta
- 2015-2019 Jiffina Yogyakarta

Jumlah Pekerja : 80 orang

NAYLA CRAFT

Nayla Craft merupakan produsen tas rajut di Kulon Progo, memiliki *showroom* yang cukup luas dan didukung oleh 25 pekerja sekitarnya untuk memproduksi dan menyediakan berbagai macam jenis kerajinan rajut dengan berbagai macam model. Produsen kerajinan rajut yang berlokasi di Karang RT 05 RW 03, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo ini juga memproduksi sepatu rajut, dompet, gantungan kunci, bros, topi dan bantal rajut. Selain dijual melalui *Showroom* Nayla Craft, produk-produk kerajinan rajut ini juga dikirim ke seluruh Indonesia.

Memulai usaha pada tahun 2010, Ibu Surti, pemilik Nayla Craft, menggandeng puluhan pengrajin tas rajut di Kulon Progo sehingga turut memajukan perekonomian Kulon Progo yang merupakan salah satu kabupaten tertinggal di bidang ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain turut serta membangun ekonomi warga sekitar Kulon Progo, Ibu Surti juga aktif memberikan pelatihan mengenai usaha membuat tas rajut, bahkan hingga keluar pulau Jawa, sehingga keahlian kerajinan rajutnya dapat ditularkan ke berbagai pihak, agar memberi manfaat untuk orang banyak.

Pada awal berdirinya, Nayla Craft sebenarnya mengalami berbagai kendala usaha, terutama dari sisi permodalan dan media promosi usaha. Baru setelah bertemu dengan PGN, di tahun 2012, kendala permodalan dan pemasaran tersebut dapat diatasi. Melalui Program Kemitraan, Nayla Craft mendapatkan dukungan permodalan, pelatihan kewirausahaan dan terutama, perluasan pasar. Nayla Craft cukup aktif diikuti dalam berbagai pameran di dalam maupun luar negeri, sehingga produknya makin dikenal. Kini Nayla Craft bisa lebih memfokuskan pengembangan usahanya melalui penciptaan inovasi produk-produk baru untuk dijual.

Testimoni Nayla Craft

"PGN selalu memberikan ruang agar kami dapat mempromosikan produk kami baik di dalam dan di luar negeri. Hingga alhamdulillah, saat ini omset kami selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Selain dukungan permodalan dan fasilitas pameran kami juga diberikan berbagai pelatihan berharga, seperti: pelatihan *management*, *e-commerce* dan pelatihan dalam mengelola

bisnis. Tidak kalah penting nya kami juga bisa bersilaturahmi dengan anggota PGN yang lain yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Melalui silaturahmi tersebut kami bisa saling mendukung dengan ikut mempromosikan produk kami ke pihak lain. Kami berharap kerjasama dengan PGN dapat terus berjalan, mengingat berkat dukungan PGN lah, Nayla Craft kini dapat terus berkembang sesuai dengan impian kami".

**KOLEKTIBILITAS PENGEMBALIAN PINJAMAN PROGRAM KEMITRAAN**

Tahun 2020, 2019, 2018, 2017

Tahun 2020

Kategori	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Nilai Tertimbang (Rp)
Lancar	-	99,84	-
Kurang Lancar	-	80,47	-
Diragukan	-	71,43	-
Macet	13.137.253.625	0,00	-
JUMLAH	13.137.253.625	-	-
Rasio Kolektibilitas	-	0,00	-
Skor	-	0	-

Tahun 2019

Kategori	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Nilai Tertimbang (Rp)
Lancar	1.835.646.451	99,93	1.834.347.118
Kurang Lancar	-	96,56	-
Diragukan	-	82,32	-
Macet	13.003.933.958	100,00	-
JUMLAH	14.839.580.409	-	1.834.347.118
Rasio Kolektibilitas	-	12,36	-
Skor	-	0	-

Tahun 2018

Kategori	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Nilai Tertimbang (Rp)
Lancar	3.472.221.455	93,10	3.232.589.350
Kurang Lancar	-	0,00	-
Diragukan	35.500.000	67,96	24.125.823
Macet	13.238.562.553	0,00	-
JUMLAH	16.746.284.008	-	3.256.715.173
Rasio Kolektibilitas	-	19,45	-
Skor	-	1	-

Tahun 2017

Kategori	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Nilai Tertimbang (Rp)
Lancar	5.365.259.293	95,22	5.108.858.981
Kurang Lancar	57.202.000	88,80	50.795.760
Diragukan	8.761.874.650	68,60	6.010.492.707
Macet	5.920.288.112	0,00	-
JUMLAH	20.104.624.055	-	11.170.147.448
Rasio Kolektibilitas	-	55,56	-
Skor	-	2	-

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Kami menjalankan Program Bina Lingkungan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat marginal terutama di sekitar daerah operasi perusahaan. Program ini kami laksanakan dalam bentuk berbagai sub program sebagai wujud kontribusi PGN dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan dalam SDGs. Dalam kaitan ini Program Bina Lingkungan berkontribusi terhadap 5 (lima) SDGs, yaitu:

- SDGs 3 - Kesehatan yang baik dan kesejahteraan.
"Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di segala usia", selaras dengan pelaksanaan paket kegiatan "Bantuan Peningkatan Kesehatan".
- SDGS 4 - Pendidikan Berkualitas.
"Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang", selaras dengan pelaksanaan paket kegiatan "Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan".
- SDGS 11 - Keberlanjutan Kota dan Komunitas.
"Membangun kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan dan berkelanjutan", selaras dengan pelaksanaan paket kegiatan "Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum".
- SDGS 10 - Mengurangi Kesenjangan.
"Mengurangi kesenjangan antar kawasan di dalam sebuah negara maupun diantara negara-negara di dunia".

Hal ini selaras dengan tujuan umum dari pelaksanaan program PKBL itu sendiri yang menegaskan adanya kesetaraan pembangunan dan hilangnya kesenjangan kesejahteraan diantara masyarakat melalui pelaksanaan PKBL.

- SDGS 13 - Aksi Terhadap Iklim.
"Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya", selaras dengan pelaksanaan paket kegiatan "Pelestarian Alam".

PGN berkomitmen penuh untuk terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan Program Bina Lingkungan melalui berbagai kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan perekonomian rakyat, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan. Kami bertekad menjalankan program sebaik-baiknya dan berupaya mengalokasikan anggaran yang lebih besar dengan mengacu kepada amanah Perundangan dan Peraturan Menteri BUMN yang menjadi dasar pelaksanaan PKBL.

Untuk itu, sekalipun tidak lagi mengalokasikan sebagian labanya untuk mendukung pelaksanaan program PKBL, sesuai kebijakan dan peraturan yang ada, PGN menyediakan dan merealisasikan sejumlah dana yang memadai untuk mensukseskan berbagai kegiatan dalam kerangka Bina Lingkungan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan maupun dalam kerangka PKBL, sebagaimana tergambar melalui beberapa tabel berikut:



Program Bina Lingkungan (Penyisihan Laba) Tahun 2020

Uraian	2020		%
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	4 = 3/2
DANA TERSEDIA			
Saldo Awal	0	3.386.681	0
Penyisihan Laba dari BUMN Pembina	0	0	0
Pendapatan Jasa Giro	0	0	0
Pendapatan Lain	0	50.613.319	0
Sub-Jumlah	0	54.000.000	0
PENGUNAAN DANA			
1. Penyaluran Dana Bina Lingkungan	0	54.000.000	0
2. Akrua Dana Bina Lingkungan	0	0	0
3. Biaya Lain-lain	0	0	0
4. Beban Dibayar Dimuka	0	0	0
Sub-Jumlah	0	54.000.000	0
Saldo Akhir	0	0	0

Program Bina Lingkungan (Biaya Perusahaan) Tahun 2020

Uraian	2020		%
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	4 = 3/2
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)			
Bantuan Korban Bencana Alam	5,403,553,486	9,386,597,643	173.71%
Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2,626,273,264	5,560,574,600	211.73%
Bantuan Peningkatan Kesehatan	1,721,384,032	4,085,290,059	237.33%
Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum	2,081,384,032	3,602,528,849	173.08%
Sarana Ibadah	2,241,384,032	3,562,238,200	158.93%
Pelestarian Alam	3,523,476,632	231,214,390	6.56%
Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan	3,045,584,022	2,384,422,340	78.29%
Sub-Jumlah	20,643,039,500	28,812,866,081	139.58%
Program Bina Lingkungan (CSR)			
Bantuan Korban Bencana Alam	4,753,236,888	1,129,405,881	23.76%
Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan	5,348,824,464	5,311,555,978	99.30%
Bantuan Peningkatan Kesehatan	9,734,406,191	14,969,114,509	153.78%
Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum	1,747,503,034	1,220,457,235	69.84%
Sarana Ibadah	3,895,890,310	3,686,306,259	94.62%
Pelestarian Alam	430,684,310	70,748,334	16.43%
Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan	671,354,810	180,294,795	26.86%
Sub-Jumlah	26,581,900,004	26,567,882,991	99.95%
TOTAL	47,224,939,504	55,380,749,072	117.27%

REALISASI PROGRAM BINA LINGKUNGAN

PGN merealisasikan berbagai kegiatan dalam kerangka Bina Lingkungan dengan mempertimbangkan kondisi terkini, melibatkan para penerima manfaat dalam proses perencanaan, realisasi maupun evaluasinya dan selaras dengan rumusan tujuan keberlanjutan dalam SDGs, dengan rincian sebagai berikut:

Bantuan Bencana Alam dan Non Bencana Alam

Mulai awal bulan Maret 2020, pandemi COVID-19, yang awalnya terdeteksi di Wuhan-China di akhir tahun 2019, mulai melanda Indonesia. Dalam rangka mengatasi dan mengendalikan pandemi tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan wabah corona virus atau COVID-19 sebagai Bencana Nasional sehingga pada tahun 2020, Indonesia dalam posisi tanggap darurat bencana non alam pandemi COVID-19.

Mempertimbangkan kondisi tersebut PGN kemudian memutuskan untuk membantu Pemerintah menanggulangi pandemi, dan menjadikan program Bantuan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 sebagai salah satu fokus kegiatan Bina Lingkungan di tahun 2020. Sehingga, realisasi program Bantuan Bencana Alam dan Non-Bencana Alam di tahun 2020, hanya terdiri dari dua kegiatan, sebagai berikut:

- Bantuan Korban Banjir di Jabodetabek dan Sumatera Utara
- Bantuan Bencana Banjir di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.
- Bantuan Bencana Kabut Asap dan Kebakaran Hutan di Riau.
- Bantuan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19



Simbolis pemberian masker melalui satgas bumh atas penyerahan bantuan PT PGN berupa 500 pcs masker kepada PMI kecamatan menteng jakarta pusat



Pemberian bantuan 1.000 paket sembako kepada Yayasan Thoriqoh Salafuna Al Hawi Jakarta Timur diperuntukan kepada masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19



Sesuai arahan SATGAS BUMN COVID-19 untuk daerah JKT Utara, 7 millenial dari PGN mewakili penyerahan bantuan Masker dan sosialisasi AKB pada masyarakat di sekitar Dermaga Kali Adem, dan 1.000 pcs Masker kepada masyarakat di RW 1 Kelurahan Ancol, serta 2.000pcs masker untuk masyarakat kepulauan seribu melalui perwakilan Kantor PemKab Kepulauan Seribu



Bantuan paket Sembako Kepada Masyarakat Terdampak COVID-19



Bantuan 230 set perlengkapan APD *reusable coverall* bagi Tenaga Medis di DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan



Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan

- Bantuan Pendidikan Putra Putri TNI dan POLRI.
- Bantuan beasiswa Perguruan Tinggi bagi 45 Putra Putri TNI dan POLRI di Riau.
- Bantuan Pendidikan di 3 PTN (UGM, UNILA, AKAMIGAS).
- Bantuan beasiswa pendidikan selama dua semester.
- Bantuan WIFI *Corner* di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Bantuan fasilitas tempat serta layanan internet untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan dan sarana IT di UIN Raden Intan Lampung.
- Bantuan Pendidikan untuk Anak Yatim dalam Rangka Nuzulul Quran.
- Bantuan pendidikan kepada lebih dari seribu anak yatim dibawah Yayasan yang berada di sekitar wilayah operasional Perusahaan.
- Bantuan Penelitian Diplomasi Sektor Energi UGM
- Bantuan biaya pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau riset diplomasi sektor energi.
- Bantuan Renovasi Sekolah.

Bantuan Peningkatan Kesehatan

- Pelayanan kesehatan melalui Mobil Sehat di wilayah operasional PGN.
- Bantuan pusat kesehatan desa di Desa Binaan PGN.
- Khitanan Massal.
- Pengadaan Mobil *Ambulance*.
- Bantuan penyediaan alat penunjang kesehatan medis untuk RS di Kalimantan Utara.

Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Umum

- Bantuan Pembuatan Sumur Artesis.
- Bantuan Perbaikan Jalan di desa Aur Muara Enim.
- Pembangunan Talud Desa, Lumajang.
- Bantuan Peningkatan Infrastruktur Desa Curahdukuh, Pasuruan.
- Pembuatan, TPT, Gorong-gorong, Rabat Beton dan Parit Desa Siharjulu, Humbang Hasundutan.

Bantuan Sarana Ibadah

- Renovasi Sarana ibadah.
- Perayaan Hari Raya Keagamaan.

Bantuan Pelestarian Alam

- Program Keanekaragaman Hayati di Kalisogo dan Pagardewa.
- Penanaman Mangrove Daerah Wisata Panaran/ Pulau Lance.
- Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di Desa Tembesi, Panaran.

Bantuan Sosial Untuk Pengentasan Kemiskinan

- Program Pangan Murah di Meulaboh, Bekasi, Pangandaran, Jombang, Bangli, Gianyar, Denpasar.
- Program Desa Binaan di Panaran dan Tambesi – Batam.
- Program Desa Binaan di Pagardewa – Muara Enim.
- Program Desa Binaan di Bojonegara – Serang.
- Program Desa Binaan di Labuan Maringgai – Lampung Timur.
- Program Desa Binaan di Desa Tambak Kalisogo– Sidoarjo, Jawa Timur.

BANTUAN APD TIM MEDIS DI 7 WILAYAH PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

Sehubungan dengan merebaknya Pandemi COVID-19 sejak awal Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Sebagai wujud kepedulian terhadap bencana kesehatan yang terjadi ini, maka PT Perusahaan Gas Negara Tbk bersama Rumah Zakat melakukan penyaluran bantuan berupa 140 paket Alat Pelindung Diri (APD) pada 7 titik lokasi berbeda di wilayah Indonesia yaitu Jakarta, Bekasi, Bogor, Cirebon, Surabaya, Palembang, dan Medan. Program ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan APD Tim Medis di Rumah Sakit serta mencegah terjadinya penularan COVID-19.

Pertimbangan utama realisasi program ini adalah tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan pasien COVID-19 harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Ditengah langkanya APD tersebut bahkan para petugas medis terpaksa harus menggunakan jas hujan seadanya sebagai pengganti APD yang sesuai standar medis.

Program ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan keberlanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya pada tujuan ke-3 Kesehatan yang baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well Being*).

Sebagai realisasi penyaluran 140 paket APD tersebut, antara tanggal 2-7 April 2020, Kami menyerahkan bantuan masing-masing 20 paket APD kepada:

- Bantuan 20 paket APD kepada RS Jakarta
- Bantuan 20 paket APD kepada RS Mitra Keluarga Bekasi Barat
- Bantuan 20 paket APD kepada RSUD Kota Bogor
- Bantuan 20 paket APD kepada RSUD Gunung Jati Cirebon
- Bantuan 20 paket APD kepada RS Husada Utama Surabaya
- Bantuan 20 paket APD kepada RSUP Dr. M Hoesin Palembang
- Bantuan 20 paket APD kepada RSUP H. Adam Malik Medan

Keseluruhan 7 rumah sakit di berbagai wilayah operasional PGN tersebut merupakan rumah sakit rujukan dalam pencegahan dan penanggulangan masyarakat yang terpapar pandemi COVID-19 di masing-masing wilayahnya.



Penyerahan Bantuan di RS Jakarta



Penyerahan Bantuan di RS Mitra Keluarga, Bekasi



Penyerahan Bantuan di RSUD Kota Bogor



Penyerahan Bantuan di RSUD Gunung Jati, Cirebon



Penyerahan Bantuan di RS Husada Utama, Surabaya



Penyerahan Bantuan di RS Muhammad Hoesin, Palembang



Penyerahan Bantuan di RSUP Adam Malik, Medan

UCAPAN TERIMAKASIH

Civitas hospitalia RSUP. dr. Mohammad Hoesin Palembang mengucapkan terimakasih atas kepedulian bapak/ibu donatur terhadap pejuang kesehatan kami, semoga donasi yang disampaikan akan menjadi kebaikan yang terus mengalir manfaat untuk kita semua.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa merapatkan barisan perjuangan ini, sehingga kita bersama dapat melawan wabah COVID-19 ini, dan meridhoi perjuangan ini.

Direktur Utama

dr. Bambang Eko Sunaryanto, Sp.KJ, MARS



PROGRAM BINA LINGKUNGAN UNGGULAN

Menindaklanjuti impian untuk bisa menjadikan desa-desa di sekitar wilayah operasional menjadi desa yang maju dan mandiri, sehingga mampu menunjang pembangunan berkelanjutan di Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), merealisasikan Program Desa Binaan. Program ini direalisasikan di area-area dimana terletak 5 *Offtake Station* (Stasiun Gas PGN) yang merupakan objek vital nasional dan memiliki peranan strategis dalam menjaga stabilitas pasokan energi di Indonesia, sehingga keharmonisan antara PGN dan masyarakat setempat untuk menjaga lokasi tersebut merupakan suatu keharusan.

Program Desa Binaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: *Social* dan *Stakeholder Mapping*, Survei ke *Stakeholder* PGN di sekitar lokasi, Perencanaan Program, Implementasi Program, Monitoring dan Evaluasi Program, *Exit Strategy* (Penyerahan Program kepada Kelompok Masyarakat). Keseluruhan tahap tersebut melibatkan masyarakat dan aparat pemerintah setempat, sehingga program-program yang dihasilkan merupakan kesepakatan bersama antara pihak PGN dan masyarakat.

Dalam rangka mendorong kemandirian desa, maka di setiap desa diupayakan realisasi pembentukan kelembagaan masyarakat berupa BUMDes (Badan

Usaha Milik Desa) maupun kelembagaan lain, dengan berbagai unit usaha masyarakat di bawahnya.

PGN selalu berusaha menciptakan program yang mampu memberikan *benefit* berkelanjutan, baik untuk masyarakat maupun untuk perusahaan.

Benefit yang diharapkan tumbuh dari realisasi Program Desa Binaan PGN ini adalah:

- Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
- Menciptakan peluang kerja dan mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.
- Meningkatkan kesadaran dan kualitas kesehatan masyarakat setempat.
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Meningkatkan keharmonisan hubungan antara PGN dengan Masyarakat dan Pemerintah setempat, maupun antar masyarakat itu sendiri.
- Mengurangi gangguan operasional bagi perusahaan yang disebabkan aspek sosial.
- Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari perusahaan, sehingga dana bantuan bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat di tempat lain.
- Menjadi media keterlibatan pekerjaan PGN dalam kegiatan sosial perusahaan.
- Menjadi media sosialisasi peran serta BUMN dan PGN dalam mendukung kesejahteraan.

PROGRAM DESA BINAAN DUSUN IV PAGARDEWA, KECAMATAN LUBAI ULU, KABUPATEN MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN

Pada pelaksanaan Program Desa Binaan di wilayah ini, PGN merealisasikan berbagai kegiatan pembinaan, meliputi:

a) BUMDes Pagardewa

Untuk meningkatkan taraf hidup dan membangun perekonomian masyarakat di wilayah operasi PGN melalui program Desa Binaan, CSR PGN membina masyarakat dengan membentuk lembaga masyarakat desa berupa BUMDes. Pembentukan BUMDes ini, salah satunya direalisasikan di Dusun IV Pagardewa, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Suatu desa yang secara geografis letaknya berdekatan dengan Stasiun Kompresor Pagardewa. Melalui pembentukan BUMDes tersebut, PGN menargetkan masyarakat desa dapat maju dan mandiri serta mampu menunjang pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

CSR PGN selalu berusaha untuk menciptakan program-program yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun perusahaan. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui program BUMDes ini, berbagai kegiatan yang dilakukan terbukti dapat memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat setempat. Selain taraf hidup mereka meningkat berkat berkembangnya perekonomian setempat, lingkungan sosial kemasyarakatan sekitar juga dirasakan semakin membaik.

b) Air Bersih dan Air Isi Ulang

Bantuan ini untuk membantu masyarakat Pagardewa untuk mengatasi masalah kekeringan. Air bersih ini bukan hanya untuk kebutuhan kebersihan, juga dapat dijadikan sumber bisnis baru di BUMDes dalam bentuk penjualan air minum isi ulang.



Gedung Bank Sampah Desa Pagardewa

c) Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam

Program lain yang direalisasikan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitar desa binaan PGN adalah pembentukan Koperasi Simpan Pinjam. Melalui keberadaan koperasi ini, para ibu-ibu di desa Pagardewa akan dapat ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pembukaan usaha dengan modal mandiri hasil gotong-royong dan terhindar dari jeratan para rentenir. Selain untuk modal usaha, pinjaman dari koperasi dapat digunakan untuk menutupi keperluan yang sangat mendesak. Masyarakat bisa mendapatkan permodalan mandiri dari hasil gotong royong sesama masyarakat agar modal tersebut dapat digunakan untuk usaha ataupun keperluan mendesak keluarga. Masyarakat khususnya ibu-ibu sangat antusias terlihat meningkatnya anggota koperasi dari 20 menjadi 38 dan akan terus bertambah.

d) Bank Sampah

Program Bank Sampah sangat dirasakan membantu masyarakat sekitar Pagardewa dalam menjaga lingkungan rumah agar senantiasa tampak bersih dan sehat selain dapat mengurangi potensi penyebaran penyakit. Program bank sampah juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari hasil penjualan sampah non-organik ke bank sampah.

Kegiatan ini juga mendukung kebijakan Bidang CSR yaitu 'Memberikan manfaat kepada *stakeholders*' dan 'Menjaga keamanan aset perusahaan'. dengan bantuan ini memberikan manfaat kepada masyarakat yang merupakan *stakeholders* perusahaan, akan melahirkan rasa memiliki dan masyarakat pada sekitar area operasi perusahaan tersebut akan ikut serta menjaga keamanan aset perusahaan.



Kegiatan *monitoring* yang dilakukan oleh pihak PT PGN di desa binaan Pagardewa



PROGRAM DESA BINAAN - DESA PANARAN, PULAU LANCE, BATAM

Pada pelaksanaan Program Desa Binaan di wilayah ini, PGN merealisasikan berbagai kegiatan pembinaan, meliputi:

a. Koperasi Tanjung Gundap

Merupakan salah satu strategi memberdayakan dan meningkatkan kelas UMKM di Desa Binaan Panaran. Koperasi saat ini memiliki anggota 81 orang dimanfaatkan oleh Nelayan, Ibu Rumah Tangga, dan UMKM.

Salah satu program Koperasi ini adalah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan masyarakat dan memaksimalkan hasil kelembagaan koperasi dan UMKM yang ada di desa binaan. Masyarakat juga dapat memperoleh modal untuk memulai usaha sehingga meningkatkan penghasilan mereka. Program ini juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja agar lebih berkembang dan mengurangi tingkat pengangguran di desa binaan tersebut. Selain itu, ekonomi kreatif yang telah dikembangkan diharapkan memunculkan ide-ide baru ataupun inovasi yang dapat dimanfaatkan bersama.

b. Tanaman Obat Keluarga

Tanaman obat keluarga merupakan media promosi kesehatan lingkungan dengan mengajak kesadaran masyarakat dalam menanam tanaman yang bernilai guna. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat aktif menanam dan membudidayakan tanaman obat untuk dimanfaatkan minimal dalam lingkup keluarga. Saat ini, beberapa UMKM berhasil memanfaatkan menjadi produk siap saji dengan omset 1 juta/bulan dan mendapat peringkat 1 tingkat Kota Batam, dan peringkat 2 tingkat nasional.

c. Posyandu Balita dan Posyandu Lansia
Kepedulian masyarakat terhadap kondisi kesehatan cukup tinggi di Desa Binaan Panaran. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata kunjungan 31 balita/bulan ke Posyandu dan tidak adanya bayi gizi buruk di Posyandu ini. Sementara itu, rata-rata kunjungan lansia tiap bulan adalah 65 orang. Dengan banyaknya lansia yang berkunjung ke Posyandu maka Posyandu Bina Keluarga Lansia mendapat peringkat kedua terbaik di tingkat Kota Batam.

d. Pulau Warna-Warni dan Perahu Jong
Program Pulau Warna-Warni dan Perahu Jong diharapkan dapat memperlihatkan keindahan pulau dengan rumah yang dicat warna-warni serta dapat melestarikan budaya lokal agar tetap bertahan dan dilestarikan. Program pulau warna warni dikembangkan dengan berbasis CBT (*Community Based Tourism*), yakni upaya menjadikan pulau dan desa-desa didalamnya sebagai destinasi wisata baik lokal maupun mancanegara. Harapannya pulau dan masyarakat didalamnya dapat berkembang baik dari sisi ekonomi maupun taraf kehidupan sosial kemasyarakatan di wilayah sekitar.

Masyarakat antusias menyambut kehadiran program ini, untuk kemudian ikut berperan aktif dalam pengecatan rumah dalam rangka mendukung program pulau warna warni. Mereka juga selalu berupaya melestarikan budaya lokal dengan mempertahankan apa yang telah diwariskan oleh generasi pendahulu. Masyarakat sadar bahwa pelestarian budaya lokal harus terus dilakukan agar tidak tergerus arus modernisasi yang sangat cepat perubahannya saat ini.



Penanaman Mangrove Desa Wisata
Pulau Lance oleh warga binaan





BAB V

KERJASAMA PENYALURAN DAN EVALUASI PROGRAM BINA LINGKUNGAN

”

“BUMN turut hadir sebagai bagian dari pengamanan pembangunan Indonesia melalui keterlibatannya dalam mitigasi maupun penanganan pasca bencana, baik langsung maupun tidak langsung serta melalui realisasi program-program pengembangan kompetensi masyarakat dalam kerangka program PKBL dan CSR”



KERJASAMA PENYALURAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DENGAN SESAMA BUMN

Selama Tahun 2020, PGN tetap menjalin sinergi dengan BUMN lain dalam merealisasikan Program Bina Lingkungan, dengan mengelola biaya perusahaan. PGN merealisasikan penyaluran dana pada Sektor Pendidikan bekerjasama dengan PT. Balai Pustaka (Persero). Adapun penyaluran pada sektor pendidikan lainnya dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Semen Padang yakni dengan Peningkatan Fasilitas Pendukung Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Sementara kerjasama antar sesama BUMN yang paling substansial adalah pada pelaksanaan Program Kemitraan, yakni saat PGN mengalihkan pengelolaan sebagian besar portofolio aset Mitra Binaan dari program kerjasama penyaluran dalam kerangka Sinergi BUMN sebelumnya, ke BUMN Khusus, yakni PT PMN, sesuai ketentuan PerMen BUMN No.S.822/MBU/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus. Total pengalihan dana PK yang direalisasikan adalah sebesar Rp177,97 miliar, seperti telah disinggung di Bab 4 Pelaksanaan Program PKBL. Kerjasama dimaksud sampai saat ini masih berjalan.

Berkat realisasi pengalihan tersebut, maka PGN dapat berkonsentrasi untuk mengelola saldo portofolio kelolaan Program Kemitraan PGN per akhir tahun 2019 sebesar Rp9,32 miliar agar terus berkembang, dan disaat bersamaan berkonsentrasi untuk melakukan penagihan terhadap saldo pinjaman mitra binaan langsung maupun saldo mitra binaan dalam kelolaan PT PNM.

Melalui pendekatan pengelolaan tersebut, saldo portofolio Program Kemitraan PGN per akhir tahun 2020 berkembang menjadi senilai Rp12,00 miliar. Penambahan saldo berasal dari pengembalian dana saldo Program Kemitraan dari BUMN Penyalur dan dari pendapatan jasa administrasi pinjaman, pendapatan jasa giro serta penerimaan lainnya, sebagaimana telah disampaikan pada Bab 4.

KERJASAMA PENYALURAN DENGAN INSTANSI/ LEMBAGA LAIN

Untuk Program Bina Lingkungan, selama Tahun 2020, PGN merealisasikan program di berbagai bidang kegiatan, bekerjasama dengan:

- a. Rumah Zakat
Penyaluran Program Bantuan APD kepada 7 rumah sakit rujukan penanganan pandemi COVID-19 di 7 wilayah operasional PGN
- b. *Center for Entrepreneurship, Change and Third Sector* (CECT) Trisakti University
Pendampingan Desa Binaan Panaran dan Pagardewa.
- c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
– tingkat Daerah maupun Pusat
Penyaluran beragam bentuk bantuan, baik dalam bentuk bantuan APD, perangkat penerapan protokol kesehatan dan obat-obatan, maupun bantuan sosial.
- d. Lembaga lainnya
Pengembangan kawasan tujuan wisata Pulau Warna-warni di Desa Binaan Pulau Lance, Batam.

BUMN HADIR UNTUK NEGERI

BUMN Hadir Untuk Negeri (BUHN), merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan dengan melibatkan hampir seluruh BUMN di Indonesia dengan kinerja yang mumpuni. Kegiatan BUHN biasanya diselenggarakan dengan melibatkan BUMN besar dan dibagi kedalam beberapa kelompok pelaksana sesuai Provinsi yang telah ditetapkan.

Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Surat Menteri BUMN Nomor S-195/ MBU / 04 / 2019 tanggal 01 April 2019 Perihal Program BUMN Hadir Untuk Negeri (BHUN) Tahun 2019.
2. Surat Menteri BUMN Nomor S-245/MBU/ D7/04/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Perubahan PIC dan Co-PIC Pelaksanaan BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2019.
3. Surat Menteri BUMN Nomor S-728/D7/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 Perihal Perubahan TOR (*Term of Reference*) BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2019.
4. Surat MenSesNeg RI Nomor B-779/M.Sesneg/ Set/TU.00.04/07/2019 tanggal 23 Juli 2019 Perihal Penyampaian Penyempurnaan Tema Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019

Latar Belakang dan Tema Kegiatan

Sebagai Negeri yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, agama dengan ribuan pulau, Indonesia telah membuktikan kekayaannya. Berbagai keanekaragaman itulah sepatutnya disyukuri dan menjadikan masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke bersatu dan menjaga keutuhan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika.

BUMN turut hadir sebagai bagian dari pembangunan Indonesia baik secara langsung melalui keterlibatan dalam proyek-proyek strategis nasional maupun secara tidak langsung melalui kontribusi penerimaan negara seperti setoran dividen, setoran pajak maupun melalui Penerimaan bukan Pajak Lainnya yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat.

BUMN Hadir Untuk Negeri bertujuan untuk menciptakan kondisi dan mendorong agar BUMN di Indonesia dapat memberikan sumbangan yang terbaik bagi negeri dan rakyat Indonesia. Kementerian BUMN dan BUMN sebagai bagian dari masyarakat bernegara, telah melaksanakan program “BUMN Hadir Untuk Negeri” secara berkesinambungan sejak tahun 2015.

Penundaan Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri

Sehubungan dengan terjadinya Bencana Nasional Pandemi COVID-19 sejak awal Maret 2020 dan masih berlangsung hingga saat Laporan PKBL ini disusun, Kementerian BUMN telah memutuskan untuk menunda Kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri, sejak tahun 2020 sampai waktu yang akan ditentukan kemudian.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN – DESA BINAAN

PROGRAM DESA BINAAN

Sejak beberapa tahun terakhir, PGN bekerjasama dengan CECT merealisasikan program Desa Binaan di beberapa desa Ring 1 di berbagai wilayah operasional PGN. Sampai akhir tahun 2020, terdapat enam program Desa Binaan, yakni:

- Desa Binaan Desa Binaan Panaran dan Tambesi di Batam,
- Desa Binaan Pagardewa di Muara Enim,
- Desa Binaan Bojonegara, Serang,
- Desa Binaan Labuan Maringgai di Lampung Timur,
- Desa Semare, Pasuruan dan
- Desa Tambak Kalisogo di Sidoarjo.

PROGRAM-PROGRAM PENGEMBANGAN DI DESA BINAAN

Program-program peningkatan kompetensi dan optimasi potensi desa yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program Desa Binaan, berbeda antar lokasi, disesuaikan dengan potensi masing-masing desa dan disesuaikan dengan kompetensi dasar masyarakat desa setempat.

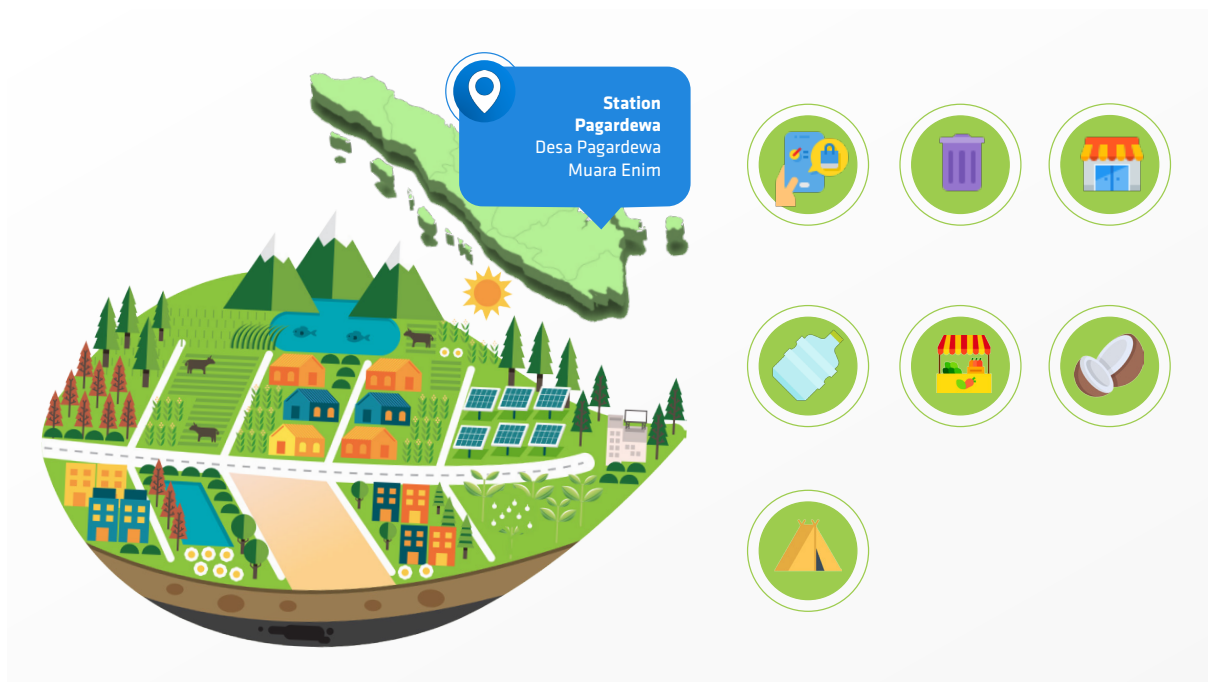


Berikut adalah gambaran pelaksanaan program Desa Binaan yang dilaksanakan PGN pada beberapa lokasi Desa Binaan.

- Desa Binaan di area Stasiun Panaran, Tanjung Gundap Pulau Lance:



- Desa Binaan di area Stasiun Pagardewa, Desa Pagardewa, Muara Enim



- Desa Binaan di area Stasiun Labuan, Maringgai, Desa Sriminosari, Lampung



- Desa Binaan di area Stasiun Bojonegara, Desa Teluk Terate, Serang - Banten.



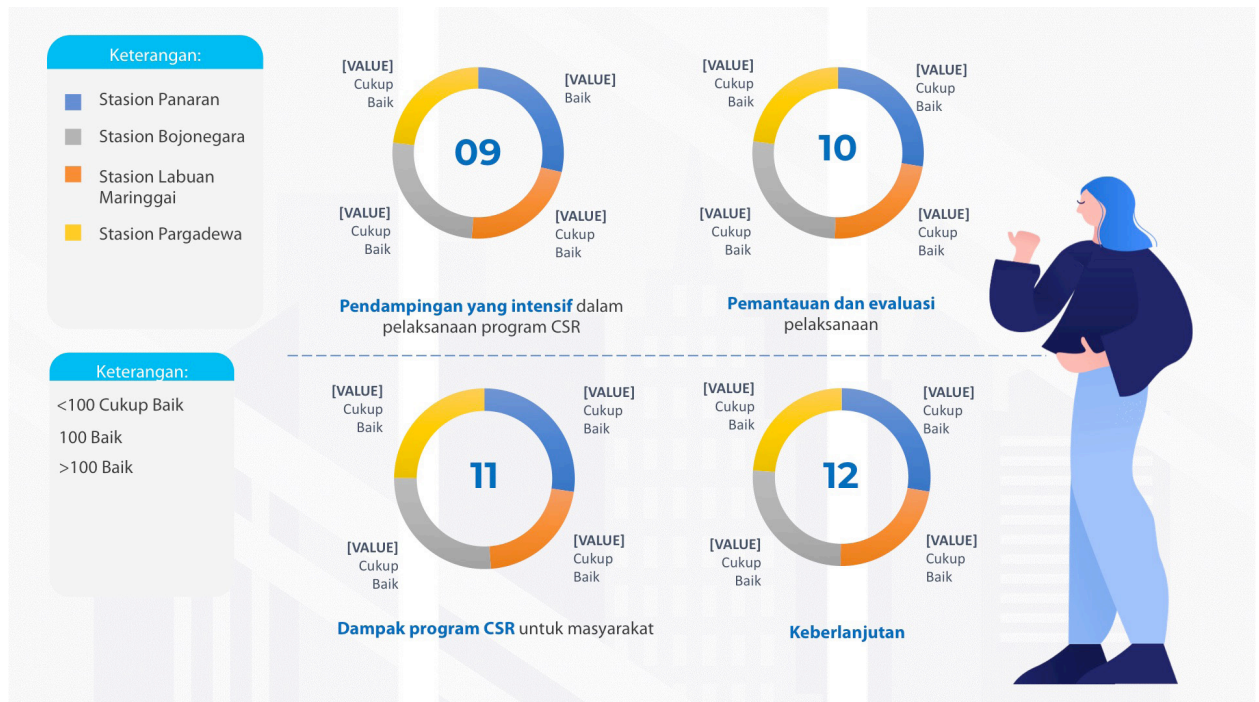
EVALUASI PENILAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Dalam rangka mendapatkan gambaran terhadap kemajuan pelaksanaan Program Desa Binaan dan mendapatkan umpan balik baik peningkatan kualitas pelaksanaan program dimasa mendatang, dan di desa-desa binaan lainnya, Kami melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di empat lokasi Program Desa Binaan. Melalui pelaksanaan evaluasi pengukuran IKM, PGN berkeinginan melihat kepuasan dan kesesuaian aspek perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi, dampak, serta keberlanjutan dari program

yang telah dilakukan kepada masyarakat di empat lokasi Pelaksanaan Program Desa Binaan, yakni: Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim; Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang; Desa Tembesi Tower, Kecamatan Segulung, Kota Batam; dan di Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Untuk IKM terdapat 12 kriteria yang dinilai, dengan gambaran hasil penilaian sebagai berikut:





EVALUASI PENILAIAN INDEKS KEMANDIRIAN PROGRAM

Selain IKM, Kami juga mengukur Indikator Kemandirian Program, dengan kriteria sebagai berikut:


Stasiun Panaran

Kelurahan Tambesi - Batam

Program	Fungsi Tata Kelola dan Prosedur Internal	Pengelolaan Keuangan	Akses kepada Pasar atau Konsumen	Pengelolaan Administrasi, Akuntansi, Pemasaran	Pengetahuan Dan Keahlian	Keberlanjutan Program (Program akan berjalan Tanpa bantuan perusahaan)	Total
Tanaman Obat Keluarga	2	1	2	1	3	2	11
Koperasi TJ Gundap	3	3	3	3	3	3	18
Koperasi Tembesi Tower	3	3	3	3	3	3	18
UMKM	2	2	3	3	3	3	16
Bank Sampah	3	3	3	3	3	3	18
Posyandu Balita	4	4	4	4	4	4	24
Posyandu Lansia	4	4	4	4	4	4	24
Pembentukan Community based Tourism (CBT): Pulau lance	1	1	1	1	1	1	6



Stasiun Pagardewa

Desa Pagardwa – Muara Enim

Program	Fungsi Tata Kelola dan Prosedur Internal	Pengelolaan Keuangan	Akses kepada Pasar atau Konsumen	Pengelolaan Administrasi, Akuntansi, Pemasaran	Pengetahuan Dan Keahlian	Keberlanjutan Program (Program akan berjalan Tanpa bantuan perusahaan)	Total
BUMDES Dewa Sejahtera	3	3	2	3	2	3	15
Bank Sampah	4	4	4	4	4	4	24
UMKM	2	2	2	2	2	2	12
Air Isi Ulang	3	3	3	3	3	3	18
Pasar Kalangan	2	2	2	2	2	2	12
Penyewaan Mesin Parut Kelapa	2	2	2	2	2	2	12
Penyewaan Tenda	2	2	2	2	2	2	12



Stasiun Labuan Maringgai

Desa Sriminosari - Lampung

Program	Fungsi Tata Kelola dan Prosedur Internal	Pengelolaan Keuangan	Akses kepada Pasar atau Konsumen	Pengelolaan Administrasi, Akuntansi, Pemasaran	Pengetahuan Dan Keahlian	Keberlanjutan Program (Program akan berjalan Tanpa bantuan perusahaan)	Total
BUMDES Tridaya Minosari Prima	3	3	3	3	3	3	18
Air Isi Ulang	1	1	1	1	1	1	6
Pariwisata	2	2	2	2	2	2	12
Microfinance (PT SMF)	4	4	4	4	4	4	24
BUMDESMart	3	3	2	3	2	2	15


Stasiun Bojanegara

Desa Teluk Terate - Serang

Program	Fungsi Tata Kelola dan Prosedur Internal	Pengelolaan Keuangan	Akses kepada Pasar atau Konsumen	Pengelolaan Administrasi, Akuntansi, Pemasaran	Pengetahuan Dan Keahlian	Keberlanjutan Program (Program akan berjalan Tanpa bantuan perusahaan)	Total
BUMDES Sabar Subur	3	3	3	3	3	3	18
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	3	3	3	3	3	3	18
Jasa Tenaga Kerja	4	4	4	4	4	4	24
Penyewaan	2	2	2	2	2	2	12
Bank Sampah	2	2	2	2	2	2	12
Perdagangan	2	2	2	2	2	2	12

EVALUASI KETERLIBATAN STAKEHOLDER

Selanjutnya juga dilakukan evaluasi terhadap keterlibatan *Stakeholder* (Pemangku kepentingan),

dengan hasil sebagaimana tergambar dalam diagram berikut:

**KETERLIBATAN STAKEHOLDER
(PEMANGKU KEPENTINGAN)**


KESIMPULAN



01

Program Desa Binaan Sesuai dengan ISO 26000: Core Subject Community Involvement and Development (CID)

Penyelenggaraan Program CID yang sesuai dengan salah satu subyek inti didalam ISO 26000



02

Program Desa Binaan Berpotensi Menciptakan Nilai Bersama (Creating Shared Value / CSV)

Pelenggaraan Program CID berpotensi menciptakan nilai Bersama/ CSV dalam hal *enabling local cluster development* atau pengembangan cluster local, karena program desa binaan selain dapat memberdayakan dan menguatkan kelembagaan desa juga dapat membantu perusahaan dalam melakukan efisiensi biaya



03

Kemitraan untuk dampak positif dan berkelanjutan

Kemitraan untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan adalah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan program.



04

Berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Program CID pada desa binaan berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs no 1, SDGs No 3, SDGs no 4, SDGs No 6, SDGs No 7, SDGs no 8, SDGs no 13, SDGs no 16, SDGs no 17

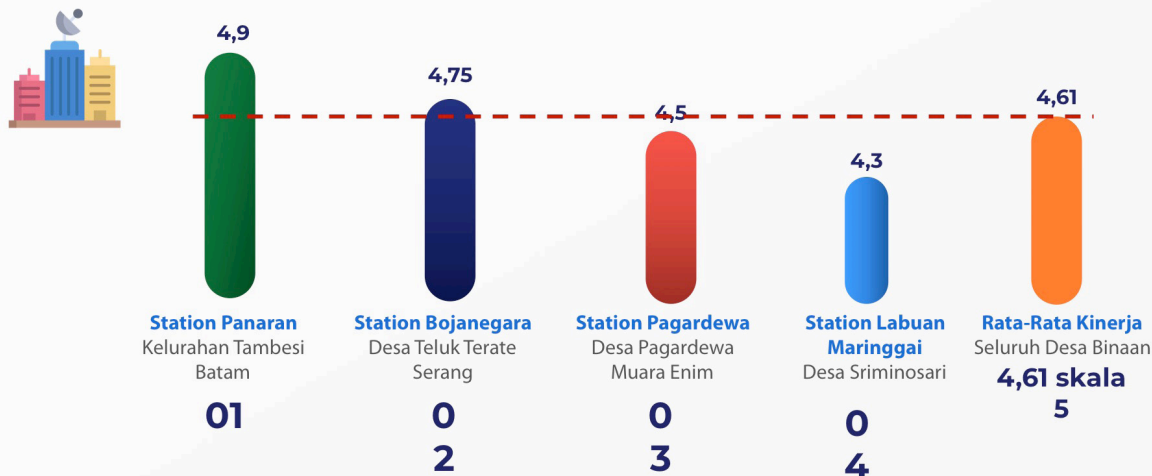


05

Berpotensi Mandiri

Memiliki Potensi Kemandirian atas Program yang dijalankan dari aspek ekonomi dan kelembagaan

Nilai Rata - Rata Kinerja Desa Binaan



Secara Keseluruhan, realisasi Program Desa Binaan memberi dampak positif yang selaras dengan upaya

pencapaian tujuan keberlanjutan, sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut:

DAMPAK PROGRAM DESA BINAAN - NEWS



Testimoni Penerima Manfaat Program Pemberian Ambulans



YAYASAN ASHOLATU MIROJUL MUMININ
Jl. H. Rimpang Raya RT. 05 RW. 09 Banten 15144
Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang
Kota Tangerang



SUMARJAN, SH
Ketua Yayasan Asholatu Mirojul Muminin

PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk merupakan perusahaan Gas Negara yang masuk dalam bagian dari Kementrian BUMN RI dan memiliki wilayah operasional nya di Provinsi Banten dan memiliki kantor di Area Tangerang telah memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya di wilayah Tangerang dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang.

Kontribusi PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, kepada masyarakat Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang adalah dengan memberikan bantuan 1 (satu) Unit kendaraan operasional pelayanan kesehatan mobil Ambulance kepada Yayasan Asholatu Mirojul Muminin yang sangat di butuhkan oleh masyarakat khususnya Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang dan diharapkan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam bidang kesehatan.

Adapaun tujuan dari adanya kendaraan operasional Ambulance ini :

1. Memberikan layanan emergency bagi pasien gawat darurat.
2. Pelayanan angkutan jenazah dengan biaya sangat murah.
3. Mempercepat evakuasi pasien dari kediamannya dengan prosedur mudah. Cepat dan siap 24 Jam.
4. Kepedulian terhadap sesama untuk tujuan sosial kemasyarakatan secara luas menyeluruh.
5. Membantu pihak Pemerintah/Rumah sakit swasta apabila sewaktu waktu diperlukan untuk membawa pasien rujukan dan sebagainya. Yang karena suatu hal Operasional Pelayanan Kesehatan milik pemerintah sedang tidak dapat digunakan sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menangani pasien.

Atas nama Yayasan Asolatu Mirojul Muminin Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada PGN dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang

Hormat Kami,

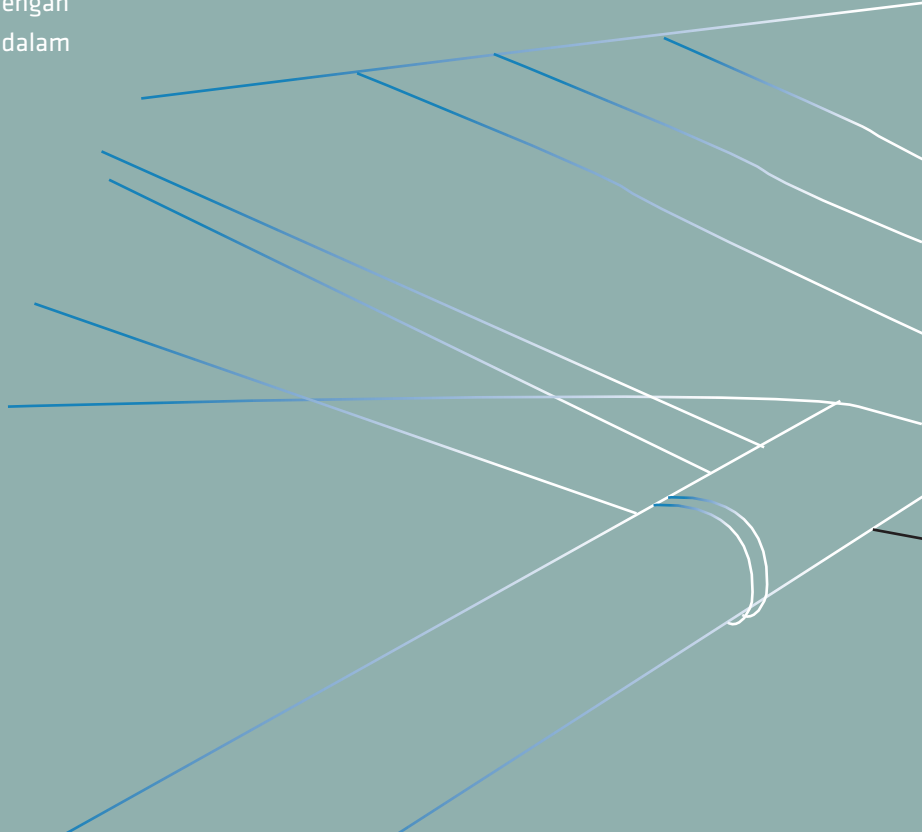
SUMARJAN, SH
Ketua Yayasan



BAB VI

TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS

”

Kami menyusun program PKBL dengan memperhatikan kondisi masyarakat terkini dan keselarasannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs)”.






NAMA AUDITOR/KAP, TEMUAN AUDITOR, JENIS PEMERIKSAAN DAN OPINI SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Uraian	2020	2019
Nama Auditor	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)
Temuan Auditor -	-	-
Jenis Pemeriksaan	Audit ETAP	Audit ETAP
Opini	Wajar dalam semua hal yang Material	Wajar dalam semua hal yang Material

TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDITOR DAN TEMUAN AUDITOR YANG BELUM DILAKSANAKAN SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Tidak ada temuan di tahun 2019 maupun di tahun 2020, sehingga tidak ada tindak lanjut yang dilakukan.

TINDAK LANJUT ARAHAN RUPS, KEMENTERIAN BUMN, DAN DEWAN KOMISARIS/ PENGAWAS ATAS PKBL

RUPST tanggal 15 Mei 2020 menyetujui untuk menetapkan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia) untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.

PENUTUP

Dalam tahun 2020, kami tetap melakukan pembinaan kepada mitra binaan melalui dukungan promosi produk mitra binaan untuk berpartisipasi pada pameran lokal maupun internasional yang diselenggarakan secara *online*, menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang melanda selama tahun 2020.

KESIMPULAN

1. Selama tahun 2020, PGN terus melakukan sinergi dengan BUMN lain dalam Program Bina Lingkungan, dengan mengelola dana biaya perusahaan. PGN kembali melakukan penyaluran program Pengentasan Kemiskinan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum.
2. Pada tahun 2020, PGN melanjutkan program pengalihan pengelolaan dana / portofolio Program Kemitraan kepada PT PMN yang telah resmi ditunjuk sebagai BUMN Khusus. Total portofolio dana Program Kemitraan yang dialihkan adalah sebesar Rp177,97 miliar. Dengan realisasi pengalihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut PGN kini berkonsentrasi untuk memonitor realisasi penagihan outstanding portofolio dana PK oleh PT PMN. PGN juga berkonsentrasi untuk mengamankan sisa outstanding portofolio pinjaman Mitra Binaan sebesar Rp9,32 miliar. Sehubungan dengan adanya pembayaran dari PT PMN dan adanya perolehan dana lainnya, dana kelolaan portofolio dimaksud, per akhir tahun 2020 telah bertambah, menjadi sebesar Rp12,00 miliar.
3. Program Bina Lingkungan PGN sampai dengan akhir tahun 2020, dilaksanakan dengan memanfaatkan biaya perusahaan. Dengan mempertimbangkan terjadinya Bencana Nasional Pandemi COVID-19, Kami menjalankan program-program pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak COVID-19 sebagai salah satu fokus pelaksanaan kegiatan Bina Lingkungan.

Program pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak COVID-19 yang dilaksanakan baik secara mandiri maupun dalam rangka kerjasama, diantaranya adalah: Bantuan APD untuk rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di Wilayah Operasional PGN, bantuan peralatan penerapan protokol kesehatan dan berbagai bantuan sosial bagi mereka yang terdampak.

Sementara program-program rutin lain yang direalisasikan, mencakup: Bantuan Pendidikan, Berbagai Bingkisan Ramadhan, bantuan kesehatan dalam bentuk bantuan alat kesehatan bagi masyarakat sekitar wilayah operasi, pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk penyediaan mobil sehat PGN selain sumbangan mobil ambulance ke beberapa daerah yang membutuhkan, pembangunan sarana dan prasarana umum.

PGN juga tetap konsisten mendukung pengembangan Desa Binaan lainnya dalam rangka mengentaskan kemiskinan, diantaranya di Dusun IV Pagardewa, Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan kegiatan meliputi: pembentukan BUMDes Pagardewa, Koperasi Karet, Koperasi Simpan Pinjam, Pembagian masker dan perlengkapan ProKes lainnya, Bank Sampah dan Pengelolaan Air Bersih lain sebagainya.

Kami juga merealisasikan program Desa Binaan di Desa Panaran, Kepulauan Riau dengan kegiatan meliputi: Pelatihan UKM untuk KPKM, Penanaman Mangrove Desa Wisata Pulau Lance dan Pengembangan Listrik (Energi Alternatif).

4. Untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan program Desa Binaan, Kami melakukan evaluasi realisasi program di empat Desa Binaan. Ada berbagai penilaian yang dilaksanakan, mencakup: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indikator Kemandirian Program (IKP), Keterlibatan *Stakeholder*, Keterkaitan SDGs dengan Desa Binaan, termasuk Dampak Program terhadap kualitas kehidupan masyarakat Desa Binaan.

Hasilnya menunjukkan, terdapat banyak manfaat positif dari pelaksanaan program Desa Binaan, juga terdapat berbagai program yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas program.

5. Kami menyusun program PKBL dengan memperhatikan keselarasannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan skala global sesuai rumusan tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), mendukung upaya Pemerintah mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dalam SDGs tersebut, sekaligus mengembangkan usaha PGN dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

6. Dalam rangka menghasilkan kinerja terbaik, pengelolaan PKBL akan Kami perbaiki kualitas pelaksanaan maupun pengelolaannya, dengan menjalankan beragam program perbaikan yang meliputi penyempurnaan sistem dan prosedur, peningkatan implementasi, optimalisasi penyaluran serta pengelolaan piutang. Dalam rangka memperbaiki kualitas pengelolaan program PKBL, Kami telah menyusun roadmap perbaikan pengelolaan, diantaranya menerapkan pengelolaan PKBL berbasis ISO 26000 sebagai rujukan pelaksanaan program di tahun-tahun mendatang.



HAK-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN PEMEGANG SAHAM

Perlu kebijakan mengenai penghapusan piutang bermasalah yang kemungkinan pengembaliannya sangat kecil.

HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN KEPUTUSAN DALAM RUPS

1. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2020.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan PKBL. Pembebasan tanggung jawab ini mencakup banyak hal sejauh tindakan tersebut tertulis dalam laporan PKBL yang telah diaudit oleh Auditor tahun sebelumnya.
3. Penetapan Auditor atas Laporan Keuangan PKBL untuk tahun buku 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Variabel Utama Pelaksanaan PKBL & TJSL

Tahun 2019

(Dalam Satuan Rupiah)

LAMPIRAN 1

No.	Uraian	Saldo Alokasi Laba		Biaya Perusahaan		TOTAL PKBL+TJSL
		Program	Program Bina	Program Bina	Program TJSL	
		Kemitraan	Lingkungan	Lingkungan		
	1	2	3	4	5	6 = 2+3+4+5
Dana Tersedia :						
1	Saldo Awal *)	9.322.251.000	3.386.681			9.325.637.681
2	Penyisihan laba dari BUMN Pembina/ APGN	0	0	0		0
3	Biaya Dari BUMN Pembina/APGN	0	0	28.758.866.081	26.567.882.991	55.326.749.072
4	Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	579.956.000				579.956.000
5	Pengembalian Dana dari BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur	1.666.668.784				1.666.668.784
6	Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	191.904.000				191.904.000
7	Pendapatan lain ***)	239.706.395	50.613.319			290.319.714
8	Penerimaan Lain		0			0
9	Dana Tersedia (jumlah 1 s.d. 7)	12.000.486.179	54.000.000	28.758.866.081	26.567.882.991	67.381.235.251
10 Penyaluran Dana dan Biaya Operasional						
11	Penyaluran melalui BUMN khusus	0				0
12	Penyaluran Melalui BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur	0				0
13	Penyaluran Hibah/Dana Pembinaan	0				0
14	Penyaluran Dana Bina Lingkungan	0	54.000.000	28.758.866.081		28.812.866.081
15	Penyaluran Dana TJSL	0			26.567.882.991	26.567.882.991
16	Biaya Operasional (Biaya Bank)	0	0			0
17	Beban Yang Masih Harus Dibayarkan	0	0			0
18	Jumlah Penyaluran Dana dan Biaya Operasional (jumlah 9 s.d. 16)	0	54.000.000	28.758.866.081	26.567.882.991	55.380.749.072
19	Dana Tersedia per 31 Desember 2019 (8-17)	12.000.486.179	-	-	-	12.000.486.179

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Bina
Lingkungan (Alokasi Laba)
sampai dengan Tahun 2019 dan Tahun 2020
Berdasarkan Jenis Bantuan yang Disalurkan
(Dalam Satuan Rupiah)

LAMPIRAN 2

Jenis Bantuan	s.d. Th 2019	Penyaluran Th 2020	Realisasi s.d. 2020
(1)	(2)	(3)	(4 = 2 + 3)
Bantuan Korban Bencana Alam	12.767.043.043	0	12.767.043.043
Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan	139.065.341.741	0	139.065.341.741
Bantuan Peningkatan Kesehatan	44.507.141.486	0	44.507.141.486
Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum	51.581.324.819	0	51.581.324.819
Bantuan Sarana Ibadah	55.242.632.353	54.000.000	55.296.632.353
Bantuan Pelestarian Alam	21.787.475.280	0	21.787.475.280
Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan	2.300.610.897	0	2.300.610.897
Bantuan Pembinaan MB	420.391.650	0	420.391.650
Sub Jumlah	327.671.961.269	54.000.000	327.725.961.269
BUMN Peduli	69.123.473.905	0	69.123.473.905
Jumlah	396.795.435.174	54.000.000	396.849.435.174

Catatan:
Penyaluran dana yang dilaporkan hanya mencakup dana BUMN Pembina sendiri yang disalurkan melalui BUMN Pembina lain/
pihak ketiga

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Bina
Lingkungan (Alokasi Laba)
sampai dengan Tahun 2019 dan Tahun 2020
Berdasarkan Provinsi
(Dalam Satuan Rupiah)

LAMPIRAN 3

Provinsi	s.d. Th 2019	Penyaluran Th 2020	Realisasi s.d. 2020
(1)	(2)	(3)	(4 = 2 + 3)
Nanggroe Aceh Darussalam	504.800.000	0	504.800.000
Bali	1.034.771.200	0	1.034.771.200
Banten	17.136.516.356	0	17.136.516.356
Bengkulu	270.000.000	0	270.000.000
D. I. Yogyakarta	3.489.023.007	0	3.489.023.007
DKI Jakarta	77.768.398.442	54.000.000	77.822.398.442
Jambi	29.400.000	0	29.400.000
Jawa Barat	52.083.498.319	0	52.083.498.319
Jawa Tengah	7.530.865.878	0	7.530.865.878
Jawa Timur	43.208.417.614	0	43.208.417.614
Kalimantan Barat	200.000.000	0	200.000.000
Kalimantan Selatan	150.000.000	0	150.000.000
Kalimantan Utara	150.000.000	0	150.000.000
Kalimantan Tengah	0	0	-
Kalimantan Timur	0	0	-
Kepri	8.106.953.971	0	8.106.953.971
Bangka Belitung	0	0	-
Lampung	45.905.268.143	0	45.905.268.143
Nusa Tenggara Barat	2.838.198.840	0	2.838.198.840
Nusa Tenggara Timur	390.000.000	0	390.000.000
Papua	1.186.514.621	0	1.186.514.621
Irian Jaya Barat, Sorong	0	0	-
Riau	1.293.006.651	0	1.293.006.651
Sulawesi Selatan	543.228.800	0	543.228.800
Sulawesi Utara	25.400.000	0	25.400.000
Sulawesi Tenggara	29.400.000	0	29.400.000
Sulawesi Tengah	0	0	-
Sulawesi Barat	0	0	-
Gorontalo	240.000.000	0	240.000.000
Sumatera Barat	1.618.014.436	0	1.618.014.436
Sumatera Selatan	43.554.535.784	0	43.554.535.784
Sumatera Utara	18.235.749.207	0	18.235.749.207
Maluku	150.000.000	0	150.000.000
Maluku Utara	0	0	-
Jumlah	327.671.961269	54.000.000	327.671.961269

Catatan : Realisasi Penyaluran tidak termasuk BL BUMN Peduli
 Penyaluran dana yang dilaporkan hanya mencakup dana BUMN Pembina sendiri yang disalurkan melalui BUMN Pembina lain/pihak ketiga

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Kemitraan
sampai dengan Tahun 2019 dan Tahun 2020
Berdasarkan Sektor Usaha Mitra Binaan

LAMPIRAN 4

Sektor Usaha Mitra Binaan	s.d. Th 2019		Penyaluran Th 2020		Realisasi s.d. 2020	
	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 + 2)	(7 = 5 + 3)
Industri	1.662	46.896.850.000	0	0	1.662	46.896.850.000
Perdagangan	1.784	24.916.425.000	0	0	1.784	24.916.425.000
Pertanian	70.451	268.240.500.000	0	0	70.451	268.240.500.000
Peternakan	622	13.872.282.000	0	0	622	13.872.282.000
Perkebunan	14.834	380.525.000.000	0	0	14.834	380.525.000.000
Perikanan	76	1.045.000.000	0	0	76	1.045.000.000
Jasa	1.188	25.477.325.000	0	0	1.188	25.477.325.000
Lainnya	95	2.822.000.000	0	0	95	2.822.000.000
Dana Pembinaan Kemitraan	-	60.066.236.935	-	0	-	60.066.236.935
Jumlah	90.712	823.861.618.935	-	-	90.712	823.861.618.935

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Kemitraan
 sampai dengan Tahun 2019 dan Tahun 2020
 Berdasarkan Provinsi

LAMPIRAN 5

Propinsi	s.d. Th 2019		Penyaluran Th 2020		Realisasi s.d. 2020	
	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 + 2)	(7 = 5 + 3)
Nanggroe Aceh Darussalam	6.080	6.830.305.938	0	0	6.080	6.830.305.938
Bali	22	422.000.000	0	0	22	422.000.000
Banten	8.163	21.115.562.579	0	0	8.163	21.115.562.579
D.I. Yogyakarta	1.814	29.089.683.736	0	0	1.814	29.089.683.736
DKI Jakarta	620	14.008.700.000	0	0	620	14.008.700.000
Jambi	213	2.336.000.000	0	0	213	2.336.000.000
Jawa Barat	24.391	85.688.365.497	0	0	24.391	85.688.365.497
Jawa Tengah	21.389	103.745.519.213	0	0	21.389	103.745.519.213
Jawa Timur	17.790	404.038.835.487	0	0	17.790	404.038.835.487
Kalimantan Barat	711	9.030.792.500	0	0	711	9.030.792.500
Kalimantan Timur	131	1.339.344.000	0	0	131	1.339.344.000
Lampung	2.231	33.199.613.310	0	0	2.231	33.199.613.310
Nusa Tenggara Timur	1	30.000.000	0	0	1	30.000.000
Papua	3	193.500.000	0	0	3	193.500.000
Riau	175	1.524.800.000	0	0	175	1.524.800.000
Sulawesi Selatan	1.952	14.121.009.576	0	0	1.952	14.121.009.576
Sumatera Barat	83	877.500.000	0	0	83	877.500.000
Sumatera Selatan	2.423	24.038.500.000	0	0	2.423	24.038.500.000
Sumatera Utara	2.520	12.165.350.164	0	0	2.520	12.165.350.164
Dana Pembinaan Kemitraan	-	60.066.236.935	-	0	-	60.066.236.935
Jumlah	90.712	823.861.618.935	-	-	90.712	823.861.618.935

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan (Alokasi Laba)

Tahun 2019 dan Tahun 2020

Berdasarkan Jenis Bantuan yang Disalurkan

(Dalam Rupiah Penuh)

LAMPIRAN 6

Jenis Bantuan	Tahun 2019	Tahun 2020			
	Realisasi	Rencana	Realisasi	% terhadap Rencana	% dari tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)	(6) = (4)/(2)
Bantuan Korban Bencana Alam	0	0	0	~	~
Bantuan Pendidikan Dan/Atau Pelatihan	90.000.000	0	0	~	0,00%
Bantuan Peningkatan Kesehatan	10.000.000	0	0	~	0,00%
Bantuan Pengembangan Prasarana Dan/Atau Sarana Umum	300.060	0	0	~	0,00%
Bantuan Sarana Ibadah	0	0	54.000.000	~	~
Bantuan Pelestarian Alam	0	0	0	~	~
Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan	0	0	0	~	~
Bantuan Pembinaan MB	0	0	0	~	~
Sub Jumlah	100.300.060	0	54.000.000	~	53,84%
BUMN Peduli	0	0	0		
Jumlah	100.300.060	0	54.000.000	~	53,84%

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan (Alokasi Laba)

Tahun 2019 dan Tahun 2020

Berdasarkan Provinsi

(Dalam Rupiah Penuh)

LAMPIRAN 7

No.	Provinsi	Realisasi Penyaluran Tahun 2019	Rencana Penyaluran Tahun 2020	Realisasi Penyaluran Tahun 2020	% dari tahun lalu	% terhadap Rencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(3)	(7) = (5)/(4)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	0	~	~
2	Bali	0	0	0	~	~
3	Banten	0	0	0	~	~
4	Bengkulu	0	0	0	~	~
5	D. I. Yogyakarta	0	0	0	~	~
6	DKI Jakarta	65.300.060	0	54.000.000	82,70%	~
7	Jambi	0	0	0	~	~
8	Jawa Barat	25.000.000	0	0	0,00%	~
9	Jawa Tengah	-40.000.000	0	0	0,00%	~
10	Jawa Timur	50.000.000	0	0	0,00%	~
11	Kalimantan Barat	0	0	0	~	~
12	Kalimantan Selatan	0	0	0	~	~
13	Kalimantan Utara	0	0	0	~	~
	Kalimantan Tengah	0	0	0	~	~
	Kalimantan Timur	0	0	0	~	~
14	Kepri	0	0	0	~	~
	Bangka Belitung	0	0	0	~	~
15	Lampung	0	0	0	~	~
16	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	~	~
17	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	~	~
18	Papua	0	0	0	~	~
	Irian Jaya Barat, Sorong	0	0	0	~	~
19	Riau	0	0	0	~	~
20	Sulawesi Selatan	0	0	0	~	~
21	Sulawesi Utara	0	0	0	~	~
22	Sulawesi Tenggara	0	0	0	~	~
	Sulawesi Tengah	0	0	0	~	~
	Sulawesi Barat	0	0	0	~	~
23	Gorontalo	0	0	0	~	~
24	Sumatera Barat	0	0	0	~	~
25	Sumatera Selatan	0	0	0	~	~
26	Sumatera Utara	0	0	0	~	~
27	Maluku	0	0	0	~	~
	Maluku Utara	0	0	-	~	~
Jumlah		100.300.060	0	54.000.000	53,84%	~

Catatan: Realisasi Penyaluran tidak termasuk BL BUMN Peduli

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan (Alokasi Laba)

Tahun 2019 dan Tahun 2020

Berdasarkan Jenis Bantuan yang Disalurkan

(Dalam Rupiah Penuh)

LAMPIRAN 8

No	Provinsi	Posisi Tahun 2019		Posisi Tahun 2020		% dari Tahun Lalu	
		Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp.	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp.	% Jumlah Unit Mitra	% Rupiah
(1)	(2)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)=(5)/(3)	(8)=(6)/(4)
1	Aceh	0	0	0	0	~	~
2	Bali	0	0	0	0	~	~
3	Banten	3	33.578.288	3	33.578.288	100%	100%
4	D. I. Yogyakarta	57	803.048.022	56	803.048.022	98%	100%
5	DKI Jakarta	9	219.664.227	9	219.664.227	100%	100%
6	Jambi				0	~	~
7	Jawa Barat	55	858.633.273	54	843.267.111	98%	98%
8	Jawa Tengah	232	7.793.788.816	232	7.793.788.817	100%	100%
9	Jawa Timur	272	2.044.950.230	5	377.481.444	2%	18%
10	Lampung	27	715.440.000	27	695.254.333	100%	97%
11	Riau	6	91.557.219	6	91.557.219	100%	100%
12	Sulawesi Selatan					~	~
13	Sulawesi Barat					~	~
14	Sumatera Barat					~	~
15	Sumatera Selatan	47	2.174.770.334	47	2.174.770.334	100%	100%
16	Sumatera Utara	2	104.950.000	2	66.500.000	100%	63%
17	Bangka Belitung					~	~
Jumlah		710	14.840.380.409	441	13.098.909.795	62%	88%

Tidak termasuk piutang bermasalah

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Posisi Piutang Program Kemitraan

Per 31 Desember 2020 Berdasarkan Sektor dan Kualitas Piutang

LAMPIRAN 9

Sektor Usaha Mitra Binaan	Lancar		Kurang Lancar		Diragukan		Macet		Total	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rp	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah
Sektor Usaha Industri	0	0	0	0	0	0	111	1.909.500.948	111	1.909.500.948
Sektor Usaha Perdagangan	0	0	0	0	0	0	18	245.848.426	18	245.848.426
Sektor Usaha Pertanian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sektor Usaha Perkebunan	0	0	0	0	0	0	223	7.256.256.650	223	7.256.256.650
Sektor Usaha Peternakan	0	0	0	0	0	0	79	3.242.558.300	79	3.242.558.300
Sektor Usaha Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sektor Usaha Jasa	0	0	0	0	0	0	8	408.984.804	8	408.984.804
Sektor Usaha Lainnya	0	0	0	0	0	0	2	35.760.667	2	35.760.667
Jumlah	-	-	-	-	-	-	441	13.098.909.795	441	13.098.909.795

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Posisi Piutang Bermasalah Program Kemitraan

Per Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

Berdasarkan Provinsi

LAMPIRAN 10

No	Provinsi	Posisi Tahun 2018		Posisi Tahun 2019		% dari Tahun Lalu	
		Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp.	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp.	% Jumlah Mitra Binaan	% Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(3)	(8)=(6)/(4)
1	Aceh	3.041	3.171.782.969	3.041	3.171.782.969	100%	100%
2	Bali	16	231.140.000	16	229.260.000	100%	99%
3	Banten	853	5.748.988.016	851	5.733.342.599	100%	100%
4	D. I. Yogyakarta	882	17.672.056.182	882	17.656.562.517	100%	100%
5	DKI Jakarta	526	8.509.738.377	524	8.481.833.377	100%	100%
6	Jambi	207	1.826.620.305	203	1.790.350.304	98%	98%
7	Jawa Barat	4.024	21.318.421.480	4.018	21.247.433.485	100%	100%
8	Jawa Tengah	10.143	34.750.515.753	10.125	34.024.277.800	100%	98%
9	Jawa Timur	2.523	18.855.868.414	2.500	18.545.304.779	99%	98%
10	Kalimantan Barat	447	6.588.058.750	447	6.588.058.750	100%	100%
11	Kalimantan Timur	131	1.234.371.000	131	1.234.371.000	100%	100%
12	Lampung	839	8.707.857.667	838	8.702.957.667	100%	100%
13	NTT	1	30.000.000	-	-	0%	0%
14	Papua	3	193.500.000	3	193.500.000	100%	100%
15	Riau	165	1.244.264.498	162	1.209.504.498	98%	97%
16	Sulawesi Selatan	1.937	13.206.121.445	1.923	13.087.452.446	99%	99%
17	Sulawesi Barat	9	65.950.000	9	65.950.000	100%	100%
18	Sumatera Barat	62	528.610.000	61	516.160.000	98%	98%
19	Sumatera Selatan	532	6.276.288.062	527	6.232.137.063	99%	99%
20	Sumatera Utara	1.923	10.329.145.230	1.921	10.258.100.897	100%	99%
21	Bangka Belitung	1	20.000.000	1	20.000.000	100%	100%
Jumlah		28.265	160.509.298.148	28.183	158.988.340.151	100%	99%

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Posisi Piutang Bermasalah Program Kemitraan

Per Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

Berdasarkan Sektor

LAMPIRAN 11

Provinsi	Posisi Tahun 2019		Posisi Tahun 2020		% dari Tahun Lalu	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp.	Jumlah Unit Mitra Binaan	Rp.	% Jumlah Mitra Binaan	% Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(2)	(7)=(5)/(3)
Sektor Usaha Industri	807	12.173.922.167	783	11.886.042.303	97%	98%
Sektor Usaha Perdagangan	1.558	16.986.159.205	1.524	16.593.226.873	98%	98%
Sektor Usaha Pertanian	24.642	113.226.079.043	24.637	112.657.055.043	100%	99%
Sektor Usaha Peternakan	174	2.118.808.013	167	2.046.114.713	96%	97%
Sektor Usaha Perkebunan	7	204.395.416	7	204.395.416	0%	0%
Sektor Usaha Perikanan	75	933.361.334	73	903.361.334	97%	97%
Sektor Usaha Jasa	921	13.526.825.692	911	13.364.265.526	99%	99%
Sektor Usaha Lainnya	81	1.339.747.278	81	1.333.878.943	100%	100%
Jumlah	28.265	160.509.298.148	28.183	158.988.340.151	100%	99%



PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Realisasi Penyaluran Dana CSR

Tahun 2020

Berdasarkan Bentuk Bantuan dan Provinsi

(Dalam Satuan Rupiah)

LAMPIRAN 12

Provinsi	Bentuk Bantuan				
	Bencana Alam	Pendidikan dan Pelatihan	Kesehatan	Sarana dan Prasarana Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
801. Aceh	-	-	-	-	
802. Bali	-	-	-	189.011.789	
803. Banten	967.600.900	223.727.000	551.680.192	239.581.632	
804. Bengkulu	-	-	-	8.590.332	
805. Gorontalo	200.000.000	-	-	-	
806. Jakarta	3.373.801.888	3.028.465.763	16.249.788.376	589.240.162	
807. Jambi	-	-	-	-	
808. Jawa Barat	954.572.669	2.303.178.250	569.900.000	836.309.147	
809. Jawa Tengah	2.526.771.420	752.618.050	209.000.000	573.413.000	
810. Jawa Timur	580.424.000	1.354.200.000	317.890.000	702.482.000	
811. Kalimantan Barat	50.875.000	-	-	-	
812. Kalimantan Selatan	-	-	-	-	
813. Kalimantan Tengah	-	-	-	-	
814. Kalimantan Timur	66.550.000	-	-	2.810.900	
815. Kalimantan Utara	-	-	213.400.000	521.940.000	
816. Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	
817. Kep. Riau	43.898.947	281.336.515	198.469.500	302.613.100	
818. Lampung	-	525.000.000	-	45.190.319	
819. Maluku	52.525.000	-	-	-	
820. Maluku Utara	-	-	-	-	
821. Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	
822. Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	
823. Papua	48.048.000	-	-	7.301.819	
824. Papua Barat	-	-	-	-	
825. Riau	320.641.500	281.000.000	235.276.000	100.000.000	
826. Sulawesi Barat	-	-	-	-	
827. Sulawesi Selatan	50.875.000	-	-	-	
828. Sulawesi Tengah	-	-	-	-	
829. Sulawesi Tenggara	52.800.000	-	-	-	
830. Sulawesi Utara	53.973.200	-	1.500.500	70.000.000	
831. Sumatera Barat	-	-	192.500.000	27.500.000	
832. Sumatera Selatan	621.209.000	357.600.000	315.000.000	360.000.000	
833. Sumatera Utara	361.072.000	763.500.000	-	269.852.736	
834. Yogyakarta	190.365.000	1.001.505.000	-	8.933.450	
Jumlah	10.516.003.524	10.872.130.578	19.054.404.568	4.822.986.084	

	Bentuk Bantuan				Total Penyaluran per Provinsi
	Sarana Ibadah	Pelestarian Alam	Pengentasan Kemiskinan	Diklat Peningkatan Kapasitas UKM	
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=1+2+3+4+5+6+7+8+9)
-	-	-	1.022.000	-	(1.022.000)
31.527.076	-	-	231.302.490	-	451.841.355
386.513.200	-	-	224.500.000	-	2.593.602.924
-	-	-	-	-	(8.590.332)
-	-	-	-	-	200.000.000
3.408.604.183	70.748.334	401.867.345	-	-	27.122.516.051
-	-	-	-	-	-
801.625.000	36.855.390	110.725.000	-	-	5.613.165.456
103.375.000	-	-	-	-	4.165.177.470
969.900.000	89.331.000	545.876.700	-	-	4.560.103.700
-	-	-	-	-	50.875.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	69.360.900
-	-	-	-	-	735.340.000
-	-	-	-	-	-
298.500.000	-	183.189.600	-	-	1.308.007.662
211.500.000	-	174.200.000	-	-	955.890.319
-	-	-	-	-	52.525.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	40.746.181
-	-	-	-	-	-
550.500.000	-	-	-	-	1.487.417.500
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50.875.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	52.800.000
175.000.000	-	-	-	-	300.473.700
-	-	319.450.000	-	-	539.450.000
-	105.028.000	374.628.000	-	-	2.133.465.000
296.500.000	-	-	-	-	1.690.924.736
15.000.000	-	-	-	-	1.215.803.450
7.248.544.459	301.962.724	2.564.717.135	-	-	55.380.749.072

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Realisasi Penyaluran Dana CSR

Tahun 2019

Berdasarkan Bentuk Bantuan dan Provinsi

(Dalam Satuan Rupiah)

LAMPIRAN 13

Provinsi	Bentuk Bantuan				
	Bencana Alam	Pendidikan dan Pelatihan	Kesehatan	Sarana dan Prasarana Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
801. Aceh	-	160.000.000	-	382.152.400	
802. Bali	-	1.016.791.085	50.000.000	44.027.294	
803. Banten	381.280.156	606.926.853	90.000.000	659.223.592	
804. Bengkulu	50.000.000	-	-	330.256.374	
805. Gorontalo	-	250.000.000	-	3.311.000	
806. Jakarta	1.135.795.236	2.454.470.750	23.233.566.231	3.090.957.588	
807. Jambi	-	45.200.000	-	119.381.788	
808. Jawa Barat	97.499.000	3.238.073.263	20.000.000	1.783.151.614	
809. Jawa Tengah	-	2.707.062.043	114.960.000	1.853.255.905	
810. Jawa Timur	-	1.372.580.275	554.623.570	787.408.433	
811. Kalimantan Barat	-	102.504.250	-	9.934.100	
812. Kalimantan Selatan	-	-	-	-	
813. Kalimantan Tengah	-	-	-	6.785.140	
814. Kalimantan Timur	-	300.000.000	-	3.011.086	
815. Kalimantan Utara	-	-	286.000.000	1.292.700	
816. Kep. Bangka Belitung	-	75.000.000	-	80.760.050	
817. Kep. Riau	-	-	145.918.285	162.768.475	
818. Lampung	-	110.431.706	138.135.453	193.138.010	
819. Maluku	100.500	1.111.111.111	-	17.016.240	
820. Maluku Utara	50.000.000	-	-	17.247.000	
821. Nusa Tenggara Barat	-	-	-	2.920.000	
822. Nusa Tenggara Timur	-	-	50.000.000	5.755.376	
823. Papua	100.000.000	480.000.000	-	16.461.040	
824. Papua Barat	-	-	-	-	
825. Riau	-	270.415.855	170.200.000	57.137.300	
826. Sulawesi Barat	-	-	-	-	
827. Sulawesi Selatan	-	5.000.000	148.700.000	920.000	
828. Sulawesi Tengah	20.981.800	170.000.000	-	2.618.000	
829. Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	
830. Sulawesi Utara	-	-	-	3.698.000	
831. Sumatera Barat	-	340.700.865	-	105.347.500	
832. Sumatera Selatan	-	166.531.706	556.940.402	248.924.455	
833. Sumatera Utara	-	1.880.136.681	422.304.820	193.061.350	
834. Yogyakarta	-	1.639.638.798	-	240.975.832	
Jumlah	1.835.656.692	18.502.575.241	25.981.348.761	10.422.897.642	

	Sarana Ibadah	Bentuk Bantuan			Total Penyaluran per Provinsi
		Pelestarian Alam	Pengentasan Kemiskinan	Diklat Peningkatan Kapasitas UKM	
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=1+2+3+4+5+6+7+8+9)
	85.000.000	-	163.416.900	-	790.569.300
	2.125.485.022	-	199.999.992	-	3.436.303.393
	426.615.873	-	464.985.600	-	2.629.032.074
	-	-	-	-	380.256.374
	-	-	-	-	253.311.000
	7.497.784.788	171.169.403	2.158.799.065	-	39.742.543.061
	10.000.000	-	-	-	174.581.788
	2.171.968.500	89.722.710	686.825.231	-	8.087.240.318
	1.259.934.000	-	889.526.067	-	6.824.738.015
	1.845.815.150	-	1.626.343.534	-	6.186.770.962
	570.000.000	-	-	-	682.438.350
	-	-	-	-	-
	120.500.000	48.500.000	-	-	175.785.140
	300.000.000	-	-	-	603.011.086
	27.000.000	-	-	-	314.292.700
	150.000.000	-	-	-	305.760.050
	192.347.000	252.105.238	587.375.200	-	1.340.514.198
	380.175.000	20.000.000	401.800.000	-	1.243.680.169
	425.000.000	-	50.000.000	-	1.603.227.851
	200.000.000	-	-	-	267.247.000
	-	-	300.000.000	-	302.920.000
	250.000.000	-	-	-	305.755.376
	150.000.000	-	-	-	746.461.040
	-	-	-	-	-
	351.145.751	96.624.000	1.215.000.000	-	2.160.522.906
	-	-	-	-	-
	5.000.000	5.000.000	170.000.000	-	334.620.000
	-	-	210.000.000	-	403.599.800
	-	-	-	-	-
	250.000.000	-	-	-	253.698.000
	10.000.000	-	4.800.000	-	460.848.365
	825.455.000	490.630.000	940.534.800	-	3.229.016.363
	1.125.845.000	-	36.595.000	-	3.657.942.851
	102.983.345	-	350.350.000	-	2.333.947.975
	20.858.054.429	1.173.751.351	10.456.351.389		89.230.635.505

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

**LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk;
2. Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk tidak mengandung informasi atau fakta yang material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Februari 2021
Atas nama dan mewakili Dewan Direksi,
PT Perusahaan Gas Negara Tbk



Suko Hartono
Direktur Utama
PT Perusahaan Gas Negara Tbk



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PENGURUS PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan 31 Desember 2020, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melaksanakan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian yang wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini atas audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

JAKARTA
26 Februari 2021

Toto Harsono, S.E.
Surat Izin Akuntan Publik No. AP.1122

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 1

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4	12,000,486,179	9,325,637,681
Piutang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")			
penyalur - bagian lancar, neto	5	-	1,665,489,059
Piutang lain-lain, neto	7	-	214,848
Beban dibayar di muka		-	153,885,955
Jumlah aset lancar		<u>12,000,486,179</u>	<u>11,145,227,543</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pinjaman mitra binaan, neto	6	-	48,054,961
Piutang pinjaman bermasalah	8	-	-
Jumlah aset tidak lancar		-	48,054,961
JUMLAH ASET		<u>12,000,486,179</u>	<u>11,193,282,504</u>
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Liabilitas yang masih harus dibayar		-	101,600,000
Angsuran belum teridentifikasi		-	1,144,325,295
Kelebihan pembayaran angsuran		<u>4,125,486</u>	<u>4,125,486</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>4,125,486</u>	<u>1,250,050,781</u>
ASET NETO			
Aset neto tidak terikat		<u>11,996,360,693</u>	<u>9,943,231,723</u>
Jumlah aset neto		<u>11,996,360,693</u>	<u>9,943,231,723</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>12,000,486,179</u>	<u>11,193,282,504</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**
Halaman 2
**LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN	9		
Pendapatan jasa giro		195,424,274	1,440,820,420
Pendapatan jasa administrasi pinjaman		190,796,000	252,634,489
Pendapatan lain-lain		<u>185,622,048</u>	<u>960,508,606</u>
JUMLAH PENDAPATAN		<u>571,842,322</u>	<u>2,653,963,515</u>
BEBAN			
Penyaluran bina lingkungan	10	(156,885,955)	(100,300,060)
Penyaluran dana melalui BUMN khusus	11	-	(177,974,635,344)
Pemulihan/(kerugian) penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	12	1,677,825,211	(2,088,095,253)
Beban administrasi dan umum		(39,652,608)	(288,521,641)
Beban dan pengeluaran lainnya		<u>-</u>	<u>(19,918,000)</u>
JUMLAH BEBAN		<u>(1,481,286,648)</u>	<u>(180,471,470,298)</u>
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT		<u>2,053,128,970</u>	<u>(177,817,506,783)</u>
ASET NETO AWAL TAHUN		<u>9,943,231,723</u>	<u>187,760,738,506</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN		<u>11,996,360,693</u>	<u>9,943,231,723</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 3

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pengembalian pinjaman dari BUMN penyalur	1,666,668,784	1,805,552,671
Pengembalian pinjaman mitra binaan	36,150,000	34,337,000
Pengembalian pinjaman piutang bermasalah	544,440,000	1,283,559,000
Pendapatan jasa giro	195,424,274	1,440,820,420
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	190,796,000	231,749,000
Penyaluran dana melalui BUMN khusus	-	(177,974,635,344)
Pengembalian sisa dana BUMN peduli	51,000,000	-
Pendapatan lain-lain	84,022,048	956,286,606
Penyaluran dana bina lingkungan	(54,000,000)	(205,600,000)
Beban administrasi dan umum	(39,652,608)	(288,521,641)
Beban dan pengeluaran lainnya	-	(19,918,000)
Kas neto diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	2,674,848,498	(172,736,370,288)
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	2,674,848,498	(172,736,370,288)
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	9,325,637,681	182,062,007,969
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	<u>12,000,486,179</u>	<u>9,325,637,681</u>

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**
Halaman 4/1
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. INFORMASI MENGENAI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (“PKBL”)
a. Pendirian dan informasi umum

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“PGN”) merupakan entitas anak PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang transmisi dan niaga gas bumi di Indonesia dan berkomitmen untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (“CSR”) melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (“PKBL”) yang diamanatkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“TJSL”). PGN membentuk Divisi CSR yang fungsi utamanya mengelola PKBL, berdasarkan:

- (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Peraturan Menteri Negara (“Meneg”) BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 sebagai pengganti Surat Keputusan (“SK”) Meneg BUMN KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 sebagai pengganti SK Menteri Keuangan No. 316/KMK/016/1994 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan melalui pemanfaatan dana dari pembagian laba BUMN, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri (“Permen”) BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, Permen BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, dan Permen BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017.
- (3) Surat Edaran (“SE”) Meneg BUMN No. 21/MBU/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan BUMN.
- (4) SE Meneg BUMN No. 07/MBU/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang pelaksanaan dan penetapan pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
- (6) SK Direksi PGN No. 006100.K/OT.00/UT/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Struktur Organisasi President Director’s Office, Strategy and Business Development Directorate and Human Capital and General Services Directorate PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan Surat Penugasan Division Head, Human Capital Management.
- (7) SK Direksi PGN No. 0017500.K/OT.00/DPO/2016 tanggal 1 Desember 2016 merubah SK Direksi PGN Nomor 006100.K/OT00/UT/2015 tentang Struktur Organisasi Finance Directorate PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan struktur organisasi Corporate Social Responsibility Division.
- (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
- (9) SK Direksi PGN No. 035500.K/OT.00/PDO/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan struktur organisasi CSR Division.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 4/2

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

**1. INFORMASI MENGENAI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (“PKBL”)
(lanjutan)**

b. Kegiatan utama

Kegiatan operasional PKBL adalah sebagai berikut:

1. Program Kemitraan (“PK”)

PK merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari penyisihan sebagian laba bersih dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya BUMN Pembina untuk disalurkan kepada usaha kecil dengan syarat-syarat berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500,000,000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2,500,000,000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Milik Warga Negara Indonesia;
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan; dan
- g. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non-Bank.

Ketentuan sebagaimana pada huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dari PK BUMN Pembina.

Dana PK diberikan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.

2. Program Bina Lingkungan (“BL”)

Program BL merupakan kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Menyalurkan dana Bina Lingkungan dalam bentuk bantuan untuk korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan serta bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**
Halaman 4/3
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

**1. INFORMASI MENGENAI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (“PKBL”)
(lanjutan)**
c. Sumber dana

Sumber dana PKBL berasal dari:

- Penyisihan sebagian laba BUMN pembina sampai dengan akhir tahun 2012;
- Pembayaran piutang oleh BUMN penyalur dan mitra binaan;
- Jasa administrasi pinjaman/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro; dan
- Pengembalian sisa dana BUMN peduli dari BUMN lain.

d. Susunan pengurus

Pengurus PKBL adalah Divisi CSR PGN. Kantor Divisi CSR beralamat di Gedung Graha PGAS, Jl. Kyai H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta Barat.

Pengurus PKBL pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Direktur Pembina PKBL dan Direktur Utama	: Suko Hartono
Kepala Divisi	: Anak Agung Raka Haryana
Kepala Departemen Operasional	: Sigit Tri Hartanto Sukamto
Kepala Departemen Perencanaan dan Pengawasan	: Tubagus Nurcholis

Pengurus PKBL pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Direktur Pembina PKBL dan	
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum BUMN Pembina	: Desima Equalita Siahaan
Kepala Divisi	: Anak Agung Raka Haryana
Kepala Departemen Operasional	: Erick Taufan
Kepala Departemen Perencanaan dan Pengawasan	: Tubagus Nurcholis

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan PKBL PGN telah disusun dan diselesaikan oleh Pengurus PKBL PGN pada tanggal 26 Februari 2021.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (“SAK ETAP”) di Indonesia dengan memperhatikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan SE Meneg BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi 2012. Kedua surat edaran tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 4/4

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode langsung sesuai dengan PER-02/MBU/7/2017 yang merupakan amandemen dari PER-09/MBU/07/2015.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya.

c. Piutang kepada BUMN penyalur

Piutang kepada BUMN penyalur merupakan pinjaman yang diberikan kepada BUMN lain sebagai bentuk sinergi antar BUMN. Piutang kepada BUMN penyalur diakui pada saat terjadi penyerahan dana kepada BUMN penyalur serta dicatat sebesar jumlah neto dana yang diserahkan kepada BUMN penyalur, setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

d. Piutang pinjaman mitra binaan dan piutang lain-lain

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh PKBL kepada mitra binaan. Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada mitra binaan dan diukur sebesar jumlah neto dana yang diserahkan kepada mitra binaan, setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Piutang lain-lain merupakan piutang jasa administrasi atas pinjaman yang sudah jatuh tempo dan piutang pengembalian sisa dana BUMN peduli dari BUMN lain.

Piutang pinjaman mitra binaan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset lancar sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan.

Penggolongan kualitas pinjaman mitra binaan ditetapkan sebagai berikut:

- i. Lancar adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- ii. Kurang lancar apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**
Halaman 4/5
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
d. Piutang pinjaman mitra binaan dan piutang lain-lain (lanjutan)

- iii. Diragukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- iv. Macet apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Penggolongan kualitas pinjaman diatas memperhatikan ketentuan dalam Pedoman Akuntansi.

e. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN penyalur, mitra binaan, dan piutang lain-lain dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih, yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Perhitungan penyisihan piutang BUMN penyalur dilakukan secara individual. Perhitungan ini telah memperhitungkan nilai terpulihkan dari arus kas yang akan diterima PKBL di masa depan selama periode pembayaran.

f. Piutang pinjaman bermasalah

Piutang pinjaman bermasalah merupakan piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya melalui penjadwalan ulang dan rekondisi, namun tidak terpulihkan. Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman dengan penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar 100% dari saldo piutang bermasalah. Di tahun 2017, Pengurus secara formal melalui Nota Dinas No. 101500.ND/HM.05.03/CSR/2017 dari Kepala Divisi CSR kepada Direktur Pembina PKBL dan Direktur Keuangan BUMN Pembina, mendefinisikan piutang pinjaman bermasalah sebagai piutang Program Kemitraan dengan kriteria sebagai berikut:

- tidak terdapat pengembalian piutang yang substansial meskipun telah dilakukan upaya pemulihan pinjaman dan konfirmasi piutang selama 3 tahun; dan/atau
- pinjaman telah berusia lebih dari 10 tahun.

Alokasi pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pengurang piutang pinjaman bermasalah dan disajikan sebagai aset tidak lancar.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 4/6

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

h. Kelebihan pembayaran angsuran

Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo piutang mitra binaan. Kelebihan pembayaran angsuran diakui sebagai liabilitas pada saat setoran tersebut diterima oleh PKBL. Kelebihan pembayaran angsuran diukur dan dicatat sebesar nilai nominal kelebihan pembayaran angsuran. Kelebihan pembayaran angsuran disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas jangka pendek.

i. Angsuran belum teridentifikasi

Angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diidentifikasi nama mitra binaannya sampai dengan tanggal laporan keuangan. Angsuran belum dapat diidentifikasi diakui sebesar nilai nominal penerimaan. Angsuran yang belum teridentifikasi disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas jangka pendek.

j. Aset bersih

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

k. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui dalam Laporan Aktivitas berdasarkan basis akrual.

Berdasarkan PER-03/MBU/12/2016, dana PKBL dapat berasal dari:

- i. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN;
- ii. Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN;
- iii. Saldo dana PK dan BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
- iv. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana PK dan BL; dan/atau
- v. Pelimpahan dana PK dari BUMN lain, jika ada.

Pendapatan diakui pada saat terpenuhinya kondisi berikut:

- i. Jumlah pendapatan diukur secara andal;
- ii. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir ke dalam PKBL; dan
- iii. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan jasa administrasi diakui hanya untuk piutang dengan kualitas lancar dan kurang lancar, dan diukur berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak dengan ketentuan manfaat ekonomis atas jasa administrasi tersebut kemungkinan besar akan mengalir ke dalam PKBL.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**
Halaman 4/7
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
I. Transaksi dengan pihak berelasi

PKBL telah melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Pihak berelasi adalah individu atau entitas yang terkait dengan PKBL.

Individu atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan PKBL jika mereka:

- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas PKBL;
- memiliki pengaruh signifikan atas PKBL; atau
- merupakan personil manajemen kunci PKBL atau entitas induk PKBL.

Suatu entitas berelasi dengan PKBL jika memenuhi salah satu hal berikut, tetapi tidak terbatas pada:

- PKBL dengan BUMN Pembina;
- PKBL dengan PKBL lain dimana kedua PKBL tersebut dibawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu; atau
- PKBL atau individu yang mengendalikan PKBL pelapor menimbulkan beban secara langsung bukan ditanggung oleh PKBL pelapor.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang

Dalam penentuan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan dan piutang lain-lain, Pengurus mempertimbangkan umur piutang dan melakukan perhitungan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yaitu umur piutang. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada.

Perhitungan penyisihan piutang BUMN penyalur dilakukan secara individual dengan memperhitungkan estimasi nilai yang dapat ditagih berdasarkan arus kas yang akan diterima PKBL di masa depan selama periode pembayaran.

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Program Kemitraan		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	<u>12,000,486,179</u>	<u>9,322,251,000</u>
	<u>12,000,486,179</u>	<u>9,322,251,000</u>
Program Bina Lingkungan		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	<u>-</u>	<u>3,386,681</u>
	<u>-</u>	<u>3,386,681</u>
Jumlah kas dan setara kas	<u>12,000,486,179</u>	<u>9,325,637,681</u>

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 4/8

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam Rupiah)

5. PIUTANG BUMN PENYALUR

Piutang BUMN penyalur adalah pinjaman yang diberikan kepada PKBL BUMN lain sebagai bentuk sinergi antar PKBL sebagaimana diinstruksikan oleh Meneg BUMN. Piutang kepada BUMN penyalur terdiri dari piutang dari:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PT Perkebunan Nusantara IX ("PTPN IX")	7,245,215,650	7,245,215,650
PT Garam (Persero) ("PT Garam")	<u>-</u>	<u>1,666,668,784</u>
Jumlah sebelum penyisihan penurunan nilai piutang	7,245,215,650	8,911,884,434
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang dari BUMN penyalur	<u>(7,245,215,650)</u>	<u>(7,246,395,375)</u>
Jumlah piutang usaha, neto	<u>-</u>	<u>1,665,489,059</u>
Dikurangi bagian lancar:		
PT Garam	<u>-</u>	<u>1,665,489,059</u>
Jumlah piutang bagian lancar, neto	<u>-</u>	<u>1,665,489,059</u>
Jumlah piutang bagian tidak lancar, neto	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang kepada BUMN penyalur adalah sebagai berikut:		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo awal	7,246,395,375	3,262,781,925
(Pemulihan)/kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(1,179,725)</u>	<u>3,983,613,450</u>
Saldo akhir	<u><u>7,245,215,650</u></u>	<u><u>7,246,395,375</u></u>

Pada tanggal 28 Desember 2015, Pengurus melakukan *rescheduling* atas piutang PTPN IX berdasarkan permintaan dari BUMN penyalur. Berikut ini adalah uraian perjanjian *rescheduling* yang telah disepakati PKBL dengan PTPN IX.

Perjanjian penjadwalan kembali piutang dengan PTPN IX

PKBL PGN melakukan kerja sama penyaluran Program Kemitraan dengan PTPN IX melalui kontrak kerja sama No. 007600.K/HM.05/KEU2014. Pada tanggal 28 Desember 2015, PKBL PGN dan PTPN IX melakukan *rescheduling* sebesar Rp25,000,000,000 dengan biaya administrasi senilai Rp3914,984,479. Pelunasan dilakukan bertahap mulai periode 2015 sampai 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang dari PTPN IX sebesar Rp7,245,215,650 telah jatuh tempo seluruhnya. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan ini, belum ada pembayaran piutang dan kesepakatan antara Pengurus dan PTPN IX untuk melakukan *rescheduling* pembayaran piutang tersebut. Oleh karena itu, Pengurus sudah melakukan pencadangan seluruhnya atas piutang PTPN IX.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**
Halaman 4/9
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Piutang pinjaman dari mitra binaan	5,853,694,145	5,927,695,975
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(5,853,694,145)</u>	<u>(5,879,641,014)</u>
Piutang pinjaman dari mitra binaan, neto	<u>-</u>	<u>48,054,961</u>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo awal	5,879,641,014	6,004,721,080
Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(25,946,869)</u>	<u>(125,080,066)</u>
Saldo akhir	<u>5,853,694,145</u>	<u>5,879,641,014</u>

Perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

2020				
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	Alokasi Penyisihan
Lancar	180 - 270 hari	-	-	-
Macet	> 270 hari	<u>5,853,694,145</u>	100.00%	<u>5,853,694,145</u>
Jumlah		<u>5,853,694,145</u>		<u>5,853,694,145</u>

2019				
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	Alokasi Penyisihan
Lancar	180 - 270 hari	48,089,000	0.07%	34,039
Macet	> 270 hari	<u>5,879,606,975</u>	100.00%	<u>5,879,606,975</u>
Jumlah		<u>5,927,695,975</u>		<u>5,879,641,014</u>

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 4/10

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

Analisis saldo piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan sektor adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Sektor peternakan	3,242,558,300	3,242,558,300
Sektor industri	1,909,500,948	1,920,184,282
Sektor jasa	408,984,804	447,861,634
Sektor perdagangan	245,848,426	270,290,092
Sektor perkebunan	11,041,000	11,041,000
Sektor lain	<u>35,760,667</u>	<u>35,760,667</u>
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	5,853,694,145	5,927,695,975
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(5,853,694,145)</u>	<u>(5,879,641,014)</u>
Piutang pinjaman mitra binaan, neto	<u>-</u>	<u>48,054,961</u>

Analisis saldo piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Sumatera Selatan	2,174,770,334	2,174,770,334
Jawa Barat	843,267,111	858,633,274
D.I. Yogyakarta	803,048,022	803,048,022
Lampung	695,254,333	715,440,000
Jawa Tengah	548,573,167	548,573,167
Jawa Timur	377,481,444	377,481,444
DKI Jakarta	219,664,227	219,664,227
Riau	91,557,219	91,557,219
Sumatera Utara	66,500,000	104,950,000
Banten	<u>33,578,288</u>	<u>33,578,288</u>
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	5,853,694,145	5,927,695,975
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(5,853,694,145)</u>	<u>(5,879,641,014)</u>
Piutang pinjaman mitra binaan, neto	<u>-</u>	<u>48,054,961</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam Rupiah)

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain terdiri atas piutang jasa administrasi atas pinjaman yang sudah jatuh tempo dan piutang pengembalian sisa dana penyaluran Bina Lingkungan dari BUMN lain.

Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Piutang jasa administrasi	689,691,467	818,846,935
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(689,691,467)</u>	<u>(818,632,087)</u>
Piutang jasa administrasi, neto	<u> -</u>	<u>214,848</u>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang jasa administrasi adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo awal	818,632,087	819,984,892
Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(128,940,620)</u>	<u>(1,352,805)</u>
Saldo akhir	<u>689,691,467</u>	<u>818,632,087</u>

8. PIUTANG PINJAMAN BERMASALAH

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PT Sang Hyang Seri (Persero) ("SHS")	73,715,000,000	73,715,000,000
Mitra binaan	48,250,340,151	49,272,098,148
PT Pertani (Persero) ("Pertani")	<u>37,023,000,000</u>	<u>37,523,000,000</u>
	158,988,340,151	160,510,098,148
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(158,988,340,151)</u>	<u>(160,510,098,148)</u>
Piutang pinjaman bermasalah, neto	<u> -</u>	<u> -</u>

Mutasi piutang bermasalah selama tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo awal	160,510,098,148	162,279,183,474
Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(1,521,757,997)</u>	<u>(1,769,085,326)</u>
Saldo akhir	<u>158,988,340,151</u>	<u>160,510,098,148</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

8. PIUTANG PINJAMAN BERMASALAH (lanjutan)

Pinjaman kepada SHS

PKBL memberikan pinjaman kepada SHS sejumlah Rp80,000,000,000 pada tahun 2012 dalam rangka pelaksanaan sinergi BUMN pada Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Pinjaman tersebut dikenakan jasa administrasi sebesar 6% per tahun dan semula akan dilunasi secara bertahap selama tahun 2013. Pada tanggal 13 Desember 2013, PGN menyetujui permohonan SHS untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman (*rescheduling*) sampai dengan tahun 2016. Saldo piutang pinjaman kepada SHS pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diklasifikasikan sebagai piutang bermasalah karena PKBL berpendapat bahwa piutang tersebut sudah tidak dapat tertagih.

Pinjaman kepada Pertani

Pada tahun 2012, PKBL memberikan pinjaman kepada Pertani sejumlah Rp77,000,000,000 dalam rangka pelaksanaan sinergi BUMN pada GP3K. Pinjaman tersebut dikenakan jasa administrasi sebesar 6% per tahun dan semula akan dilunasi secara bertahap selama tahun 2013. Pada tanggal 13 Desember 2013, PKBL menyetujui permohonan Pertani untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman sampai dengan bulan April 2014, kemudian menyetujui rekondisi pada tanggal 30 Juni 2014. Saldo piutang pinjaman kepada Pertani pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diklasifikasikan sebagai piutang bermasalah karena PKBL berpendapat bahwa piutang tersebut sudah tidak dapat tertagih.

Saldo piutang bermasalah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan industri adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Sektor pertanian	112,657,055,043	113,226,079,043
Sektor perdagangan	16,593,226,873	16,991,512,539
Sektor jasa	13,364,265,526	13,527,625,692
Sektor industri	11,886,042,303	12,168,568,833
Sektor peternakan	2,046,114,713	2,118,808,013
Sektor perikanan	903,361,334	933,361,334
Sektor perkebunan	204,395,416	204,395,416
Sektor lain	<u>1,333,878,943</u>	<u>1,339,747,278</u>
	158,988,340,151	160,510,098,148
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(158,988,340,151)</u>	<u>(160,510,098,148)</u>
Piutang pinjaman bermasalah, neto	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**
Halaman 4/13
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

9. PENDAPATAN

	2020		
	Program Kemitraan	Program Bina Lingkungan	Jumlah
Jasa giro	195,208,077	216,197	195,424,274
Jasa administrasi pinjaman	190,796,000	-	190,796,000
Pendapatan lain-lain	185,622,048	-	185,622,048
Jumlah	571,626,125	216,197	571,842,322

	2019		
	Program Kemitraan	Program Bina Lingkungan	Jumlah
Jasa giro	1,438,875,572	1,944,848	1,440,820,420
Jasa administrasi pinjaman	252,634,489	-	252,634,489
Pendapatan lain-lain	960,136,059	-	960,136,059
Jumlah	2,651,646,120	1,944,848	2,653,590,968

10. PENYALURAN DANA BINA LINGKUNGAN

Penyaluran dana bina lingkungan dilakukan kepada sektor-sektor berikut:

	2020	2019
Sarana dan/atau prasarana umum	74,885,955	300,060
Kesehatan	61,000,000	10,000,000
Pendidikan	21,000,000	90,000,000
Jumlah	156,885,955	100,300,060

11. PENYALURAN DANA MELALUI BUMN KHUSUS

Pada tanggal 9 Mei 2019, PKBL PGN melakukan penyaluran Dana Kemitraan melalui PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ("PT PNM") berdasarkan surat dari Menteri BUMN RI No. S-822/MBU/12/2018. Penetapan PT PNM sebagai BUMN Khusus yang akan menyalurkan dana Program Kemitraan BUMN merupakan bentuk tindak lanjut pelaksanaan Bab IV Permen BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

	2020	2019
PT PNM	-	177,974,635,344
Jumlah	-	177,974,635,344

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**

Halaman 4/14

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam Rupiah)

12. PEMULIHAN/(KERUGIAN) PENYISIHAN PENURUNAN NILAI PIUTANG PINJAMAN

Rincian atas beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pemulihan/(kerugian) penyisihan penurunan nilai - BUMN penyalur (Catatan 5)	1,179,725	(3,983,613,450)
Pemulihan penurunan nilai - mitra binaan (Catatan 6)	25,946,869	125,080,066
Pemulihan penurunan nilai - piutang lain-lain (Catatan 7)	128,940,620	1,352,805
Pemulihan penurunan nilai - piutang pinjaman bermasalah (Catatan 8)	<u>1,521,757,997</u>	<u>1,769,085,326</u>
Jumlah	<u>1,677,825,211</u>	<u>(2,088,095,253)</u>

13. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI

Selama tahun 2020 dan 2019, PKBL melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak dan sifat dari transaksi-transaksi pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi	Sifat hubungan	Transaksi
BRI, BNI, Bank Mandiri	Entitas dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia	Penempatan dana pada rekening bank
PTPN IX, PT Garam, SHS, Pertani	Entitas dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia	Kerja sama penyaluran dana Program Kemitraan
PT PNM	Entitas dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia	Kerja sama penyaluran dana melalui BUMN khusus

Rincian transaksi dan saldo dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Jasa administrasi pinjaman		
PTPN IX dan PT Garam	<u>180,000,000</u>	<u>252,634,489</u>
Pengembalian piutang pinjaman dari BUMN penyalur dan piutang bermasalah		
PT Garam	1,666,668,784	1,805,552,671
Pertani	<u>500,000,000</u>	<u>1,200,000,000</u>
	<u>2,166,668,784</u>	<u>3,005,552,671</u>
Pendapatan jasa giro		
BRI	195,208,077	1,438,875,572
BNI	<u>216,197</u>	<u>1,944,848</u>
	<u>195,424,274</u>	<u>1,440,820,420</u>

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK**
Halaman 4/15
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

13. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Penyaluran dana melalui BUMN khusus PT PMN	-	177,974,635,344
Aset		
Kas dan setara kas (Catatan 4)	12,000,486,179	9,325,637,681
Piutang pinjaman bermasalah* (Catatan 8)	110,738,000,000	111,238,000,000
Piutang BUMN penyalur* (Catatan 5)	<u>7,245,215,650</u>	<u>8,911,884,434</u>
	<u>129,983,701,829</u>	<u>129,475,522,115</u>

*) Saldo sebelum penyisihan kerugian penurunan nilai piutang

14. REKLASIFIKASI AKUN

Perusahaan melakukan reklasifikasi akun pada laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

	<u>Sebelum reklasifikasi</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Setelah reklasifikasi</u>
<u>31 Desember 2019</u>			
Piutang pinjaman mitra binaan - bagian lancar, neto	48,054,961	(48,054,961)	-
Piutang pinjaman mitra binaan - bagian tidak lancar, neto	-	48,054,961	48,054,961
Pendapatan lain-lain	2,856,399,350	(1,895,890,744)	960,508,606
Pemulihan/(kerugian) penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	(3,983,985,997)	1,895,890,744	(2,088,095,253)

15. WABAH COVID-19

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, telah terjadi penurunan ekonomi akibat wabah penyakit COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap permintaan produk, layanan dan rantai pasokan untuk usaha-usaha dari Mitra Binaan. Manajemen telah mengkaji dampak dari peristiwa tersebut terhadap aktivitas PKBL Perusahaan. Berdasarkan hasil kajian saat ini, manajemen berkeyakinan bahwa, dampak negatif jangka pendek tersebut telah dipertimbangkan dan dapat diatasi melalui kebijakan manajemen.

Manajemen akan terus memantau dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait dengan peristiwa ini di masa depan.



Bersama

Menghadapi Tantangan

Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 2020

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

Jl. K.H . Zainul Arifin No. 20

Jakarta 11140 Indonesia

T 6221 633488

F 6221 633 3080

E contact.center@pgn.co.id

www.pgn.co.id